



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN
DIREKTUR UTAMA PERTAMINA HULU ENERGI, PERTAMINA HULU
ROKAN DAN PERTAMINA HULU MAHAKAM**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 10 April 2023
Waktu : Pukul 14.10 WIB s.d. 17.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F- Nasdem/ Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Strategi peningkatan kegiatan hulu migas Tahun 2023.
2. Realisasi *lifting* triwulan I tahun 2023.
3. Lain – lain.
Hadir : 22 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/ Ketua Komisi VII DPR RI)
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

3 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.

3. Mercy Chriesty Barends, S.T.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Drs. Mukhtarudin
3. Ir. Lamhot Sinaga
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rico Sia
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., MAP.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Psi, M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
3. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Muhammad Nasir
2. Rusda Mahmud
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I. Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Wiko Migantoro (Dirut PT Pertamina Hulu Energi)
2. Chalid Said Salim (Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam)
3. Jaffee A. S (Dirut PT Pertamina Hulu Rokan)
4. Oto Gurnita (Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Hulu Energi)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, Bapak Ibu sekalian.

Mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina Huru Energi (PHE) dengan menghadirkan juga Dirut atau Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam dan juga Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan.

Bapak-Ibu sekalian.

Marilah kita mulai rapat ini.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, semua lagi *on the way* ada judulnya *on the way* Celine Dion.

Yang kami hormati juga Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI dan Juga barang tentu yang kami hormati juga Dirut PT Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Mahakam dan juga Pertamina Hulu Rokan serta beserta jajarannya.

Pertama, pasti kita bersyukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *walafiat*, sehingga bisa menyelenggarakan rapat seperti hari ini.

Dan sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina Huru Energi dengan menghadirkan juga Dirut atau Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam dan Direktur Utama PT Pertama Hulu Rokan, dengan agenda sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kegiatan hulu migas Tahun 2023,
2. Realisasi *lifting* triwulan I tahun 2023,
3. Lain-lain.

Bapak-Ibu sekalian.

Berdasarkan catatan sekretariat, bahwa Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 18 anggota dari 51 anggota dan terdiri dari 7 fraksi dari 9

fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan bersifat terbuka. Bapak-Ibu sekalian, disetujui?

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Tadi saya lupa itu ketika rapat dengan Kadin *nggak* dibuka ketok *gitu*, tapi ditutup, bukan apa-apa di tengah-tengah ini kita agak rileks dikit ya karena jam-jam agak meresahkan ini, tapi, tapi semuanya berkah.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Selanjutnya sebelum rapat ini dimulai, saya minta persetujuan bahwa rapat ini maksimal, sekali lagi maksimal berlangsung hanya 2 jam saja setuju Bapak-Ibu sekalian ya? *Oh* bahkan 1 jam, bagaimana Pak Nasir?

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ketua, kita tentukan saja 1 jam walaupun nanti harus diperpanjang, kita perpanjang.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Perpanjang ya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kita ikutin mekanisme aja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Nasir begini kan kita ini mau apa lagi kita *tuh*, kebetulan Rokan yang punya wilayah Pak Nasir *kan*.

Setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Baiklah, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital, saya kira ini berulang-ulang dan kita semua tahu bahwa migas juga berperan penting sebagai modal pembangunan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mendalami realisasi *lifting* PT Pertamina ulu Energi triwulan I tahun 2023 dan strategi untuk melakukan peningkatan di sektor hulu migas.

Kita sama-sama tahu bahwa sekarang Pertamina mencakup kurang lebih 67% dari *lifting* nasional, ini luar biasa nanti mungkin bisa di apa gambarkan. Jadi juga Pertamina adalah 32% dari produksi gas nasional.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat dengan pendapat ini kami berikan kesempatan kepada Dirut PT Pertamina Hulu untuk menyampaikan pemaparannya dan nanti ditindaklanjuti oleh PT Pertamina Hulu Mahakam dan juga PT Pertamina Hulu Rokan, saya kira demikian.

Dipersilakan Pak Wiko.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih.

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Pada kesempatan kali ini saya datang bersama, sebelah kanan saya Pak Buyung Direktur PHR, kemudian ada Pak Otto Direktur Dukungan Bisnis PHE dan sebelah kiri saya Pak Pak Chalid direktur, dalam undangan hari ini sebagai Direktur PHM Pak, kebetulan beliau juga Direktur Regional 3 juga Direktur PHE, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Interupsi Pimpinan. Ya terima kasih Pimpinan.

Kami menghargai presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Wiko, namun sebelum dimulai untuk paparan selanjutnya kami minta klarifikasi Pak, ya bertab~~ayy~~*ayy*un dulu Pak di ramadhan terhadap ada peristiwa bulan yang lalu ketika Komisi VII melakukan kunjungan spesifik ke PHM Kalimantan Timur, waktu itu ada Pak Wiko juga ada, waktu itu.

Dirut PHM tidak hadir sama sekali di kunjungan tersebut ya, kami sampai *landing* pada pukul 10.00 pagi. Seharusnya kita melakukan kunjungan ke PHM, berhubung karena dirut tidak hadir di sana sampai pukul 8 malam kita tidak ada kegiatan sama sekali dan itu dipimpin oleh Pak Dony, rombongan waktu itu *full, full capacity*. Sehingga dilakukanlah pada malam harinya FGD yang dipimpin oleh SKK Migas ya, Pak Doni pun memimpin rapat.

Nah kami tanya dengan sekretariat bahwa adakah diundang atas nama Dirut PHM? Ada, kenapa *nggak* diberi kabar kepada rombongan Pimpinan Pak Dony Oekon ketidakhadiran beliau, tidak ada kabar sama sekali.

Nah saya pikir ini sebuah pelecehan lah ya Pak, pelecehan, kontra parlemen, apapun namanya sama sekali tidak ada penghargaan Komisi VII dihadapan PHM pada waktu itu. Justru karena itu pada sebelum dimulai kami minta klarifikasi dulu Pak ya karena supaya jelas ini ya.

Kita memberikan beberapa poin kepada beliau ke depan, sehingga yang hari ini, yang hari ini, yang kami rasakan ada seorang GM ya, GM di region 8 ya Pak. Zona 8 yang melayani kami, yang memberikan hidangan kopi, yang memberikan hidangan makanan. Apakah gara-gara itu beliau di *suspend*, seperti istilah dalam persahaman itu udah *suspend*, pemberhentian sementara.

Nah kami minta klarifikasi kalau memang kehadiran DPR di sana membuat Saudara GM ini diberhentikan, berarti kami datang berdosa *dong* Pak *kan gitu*. Dosakah kami datang ke sana, sehingga ada GM yang dipecat, atau yang diberhentikan sementara. Tentu poin hari ini kami minta klarifikasi, supaya tidak menjadi *su'udzon*, fitnah dan sebagainya. Saya pikir perlu disampaikan oleh dari PHM, ada Pak Wiko sebagai *holding*-nya di sini.

Itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya terima kasih.

Saya minta persetujuan anggota yang lain, betul ya kita perlu *tabayyun* klarifikasi. Setuju?

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Saya pikir selain klarifikasi Pak Ketua, bahwa perilaku itu juga menurut saya adalah udah sebuah *contempt of parliament* karena sampai hari ini itu kita melakukan kunjungan tanggal 7 Februari.

Saya masih ingat betul kita bilang ke Pak Wiko, Pak Wiko apabila Saudara Dirut tidak bisa hadir pagi ini, maka kita tunggu sore atau sampai malam, betul ya Pak Wiko ya? Sampai malam, ternyata yang bersangkutan tidak hadir. Bahkan sampai rapat hari ini tidak ada surat pernyataan apapun *gitu loh* ya atas ketidakhadirannya pada saat itu.

Nah menurut saya bahwa ini adalah sebuah perilaku yang telah melakukan pelecehan terhadap kelembagaan kita, *nah* walaupun nanti mau dimintakan klarifikasi tetapi rapat kita kali ini perlu menegaskan bahwa tindakan tersebut sudah melakukan sebuah pelecehan terhadap kelembagaan, *contempt of parliament* ya itu perlu menjadi satu kesimpulan kita. Dan meminta kepada Pertamina dalam hal ini *holding* untuk melakukan tindakan tegas



terhadap yang melakukan pelecehan kelembagaan ini. Itu menurut saya, begitu Pimpinan.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Interupsi Pimpinan, Falah Amru Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Falah setelah itu.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya sepakat dengan kawan-kawan ketika Komisi VII berkunjung setidaknya memang harus ada direktur atau yang bertugas itu memang harus hadir. Bahwasanya itu harus perlu klarifikasi atau perlu harus *tabayyun* di bulan yang penuh berkah ini itu bagus, tapi kalau terkait dengan harus klarifikasi, terkait internal dari PHE saya pikir bukan klarifikasi.

Kalau misalnya orang yang memberikan makanan sampai ke ruang meja, kemudian itu kemudian di-*suspend* itu bukan diklarifikasi mereka. Tapi beliau-beliau ini PHE bisa aja memberikan keterangan kenapa harus di-*suspend*? Itu saja.

Terima kasih.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi Ketua, kita sepakat bahwa di bulan yang penuh *barokah* ini perlu ada klarifikasi ya terkait kawan-kawan kunjungan ke Kalimantan, tetapi ada sedikit pendapat saya yang mungkin tidak sama dengan pandangan kawan kita Lamhot terkait dengan *contempt of parliament* ya *kan*.

Kita jujur saja, kita juga kan mempunyai tugas kunjungan ke daerah itu kan ke wilayah atau ke tempat kunjungan kita itu kadangkala kita berhalangan Pak, kita tidak hadir. Kita Anggota DPR RI, apakah kita juga melakukan *contempt of parliament* kan bukan itu juga ukurannya.

Mungkin yang bersangkutan tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi, *nah* mungkin di forum ini bisa disampaikan klarifikasi iya *kan*. Kalau kita langsung men-*judge* bahwa yang bersangkutan melakukan *contempt of parliament* salah juga kita karena yang hadir juga *nggak* seluruh anggota juga ke sana ya *tabayyun* lah, *tabayyun*.

Mungkin itu saja Pimpinan ya, terima kasih.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pak Gunhar karena sudah menyebut nama saya Pak Ketua izin.

Rasa-rasanya saya setiap ada Kunker dan Kunspek saya *nih* Lamhot Sinaga walaupun saya tidak bisa hadir dalam sebuah acara, pasti saya lapor saya tidak hadir. Tapi saya tidak pernah melecehkan saking saya menghargai Komisi VII ini, itu saya secara pribadi Pak.

Tapi kalau kemudian ada direksi yang dari tanggal 7 Februari sampai hari ini tidak merasa bersalah apapun tidak memberikan klarifikasi, tidak memberikan permohonan maaf ataupun tidak ada surat yang menyatakan apakah yang bersangkutan sakit atau tidak lagi berhalangan, tidak ada surat sama sekali, bahkan telepon pun *nggak* ada. *Nah* kalau saya secara pribadi saya pastikan ketika saya tidak bisa mengikuti satu kegiatan komisi, saya pastikan bahwa saya akan memberikan paling tidak pemberitahuan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya saya sudah menangkap esensi dari ini semuanya, kita semuanya perlu *tabayyun*, perlu klarifikasi. Jadi melalui Pak Direktur Pertamina Hulu Energi Pak Wiko dipersilahkan pihak yang dimaksud untuk menyampaikan klarifikasinya, kenapa tidak hadir ketika Komisi VII menyampaikan kunjungan waktu itu dengan berbagai, mungkin alasan atau apa dan sebagainya.

Dan menurut hemat saya secara pribadi juga itu sangat-sangat tidak etis dan karena ini adalah, semua adalah kegiatan kenegaraan bahwa semua penting pasti tetapi semua teragendakan dengan baik dan setidaknya harus ada pemberat.

Silakan Pak Wiko, mungkin nanti juga dipersilakan yang bersangkutan untuk memberi klarifikasi.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Tentu saja yang pertama-tama kami sampaikan bahwa kami sangat menyesalkan kejadian ini dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas situasi yang terjadi di Balikpapan tersebut.

Yang kedua, mengenai hal yang terkait GM itu adalah sesuatu yang sangat terpisah nanti juga kami bisa jelaskan kalau dimintakan Pak. Untuk lebih *afdhol*-nya mungkin kami persilakan Pak Chalid untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus mungkin permohonan maafnya.

Silakan Pak Chalid.



DIRUT PT PHM (CHALID SAID SALIM):

Oke, terima kasih Pak Wiko.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan.

Saya Chalid Said Pak sebagai Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam. Pada kesempatan ini tentunya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Komisi VII pada saat kunjungan kerja ke Balikpapan. Kalau sedikit saya tambahkan bahwa pada saat yang bersamaan Pak, kami sedang membahas rencana jangka panjang dengan komisaris dan juga ada satu insentif untuk blok PHKT *gitu* ya dengan ada beberapa teman-teman ESDM *gitu* Pak, begitu Pak yang bisa saya sampaikan.

Sekali lagi intinya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya setidaknya ada proses katakanlah memberitahu atau apa bahwa anda tidak bisa hadir dan sebagainya. Waktu itu ada tim yang mendapatkan penjelasan itu misalnya.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Pimpinan, yang pertama saya kira bahwa kunjungan Komisi VII itu bukan hari ini dipikirin, *eh* besok berangkat ya. Rencana kunjungan kerja Komisi VII juga adalah sesuatu yang terencana sekian waktu sebelumnya dan saya juga yakin bahwa rapat yang Bapak ikuti kalau itu sedemikian pentingnya juga bukan sore ini diputusin, *eh* besok kita rapat ya *gitu*.

Artinya dua-duanya adalah sebuah hal yang sangat terencana dan terjadwal, jika memang sudah terencana dan terjadwal dan kemudian sudah terprediksi akan bentrok dan tidak bisa hadir kan logika sederhananya itu harusnya bisa dikomunikasikan pada Komisi VII sebelum kami berangkat ke sana *gitu*.

Jadi kami melihat ini sebetulnya hal yang sederhana Pak, komunikasi tapi ketika itu tidak dilakukan dan Pimpinan dari PHM ini menyepelkan urusan komunikasi. Jadi kalau di maaf Pak, saya orang Jawa Barat kalau di bahasa Sunda itu ada pepatah "*hadeku basa gorengku basa*", baik-buruk seseorang itu bagaimana dari pola komunikasinya.

Jadi klarifikasi tadi mungkin disampaikan dengan sesudah sekian lama disampaikan, tapi memang betul Pak saya termasuk yang hadir ke sana dan kita kecewa berat Pak *gitu* dan bertanya tidak ada satupun yang bisa menjawab

menjelaskan Bapak kemana, kan juga menjadi unik *gitu*, *nggak* ada yang bisa jelasin bapak ke mana *gitu*. *Kan nggk* mungkin tidak, apakah yang dari bawah itu semua tidak ada yang berani atau diminta untuk tidak memberikan penjelasan *gitu*.

Kita juga Komisi VII ini juga adalah manusia Pak, kalau diberi alasan-alasan yang kuat, logis, rasional ya Pak Ketua, saya kira kita juga bisa memahami *gitu*. Tapi kalau justru tidak ada keterangan apapun, jadi timbullah berbagai macam persepsi Pak *gitu*.

Ini sebuah, menurut saya sebuah catatan berat untuk sebuah perusahaan di level Pertamina untuk sebuah posisi setinggi Bapak tidak mampu mengkomunikasikan hal-hal yang sederhana.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, bagaimana Saudara, kenapa tidak mengkomunikasikan kegiatan Saudara yang sehingga tidak bisa menghadiri dalam kunjungan tersebut? Mungkin ada hp-nya *lowbat* atau apa di-*blank* atau apa, atau anda sedang tersandera oleh situasi yang komunikasi pun tidak bisa.

Dipersilakan.

DIRUT PT PHM (CHALID SAID SALIM):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau dari sisi komunikasi dan yang lain-lain, artinya saya masih, masih bisa lah berkomunikasi tapi pada saat itu mungkin mengambil suatu keputusan yang salah saya. Jadi lebih fokus untuk apa namanya pekerjaan yang saya akan kerjakan di apa namanya di hari itu.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Anda waktu itu di mana posisinya? Mengerjakan apa?

DIRUT PT PHM (CHALID SAID SALIM):

Di Bogor Pak untuk rencana jangka panjang dengan komisaris dan ada pembahasan sedikit tentang insentif dari satu blok kami.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Komisaris maksudnya Komisaris Pertamina, Komut begitu atau apa?



DIRUT PT PHM (CHALID SAID SALIM):

Komisarisnya di PHE.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh Komisaris PHE, ya kita biar *clear* ya nanti kan kita akan *track* betul karena ini bagi kami memang sangat serius, inikan soal ketatanegaraan ini, ini bukan persoalan sederhana. Jadi sekali lagi Pak, kita tidak ingin apa tapi kita akan *track* telusuri terus.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya setelah Pak Nasir nanti Pak Gandung.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi, *ndak*, Bapak ini kan diangkat jadi dirut sebagai penanggung jawab, *nah* kalau kita ini nggak Bapak anggap sebagai Komisi VII datang ke sana terus maunya apa *gitu*? Bapak keluar aja dari ruangan ini, kita juga *nggak* mau nengok anda dari sini, ngapain? Dan *nggak* usah jadi dirut kalau kayak *gini*, ngapain ditaruh dirut.

Bapak kan *nggak* bertanggung jawab ini, pertanggungjawabanmu untuk negara dan kami mengawasi regulasi pengawasan negara. Dan ada yang kami tanya untuk bisa bertanggung jawab itu Pak Dirut, kalau anda *nggak* ada, anda kasih tahu Pak Wiko ini, Pak Wiko suruh menggantikan ke sana sebagai Dirut *Holding*. Iya terus dia di mana, Bapak bisa menjelaskan pekerjaan yang dikerjakan? Kan *ndak* bisa.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Holding waktu itu hadir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya tapi kan bisa Bapak jelaskan pekerjaan yang dikerjakan dia, kan *nggak* bisa. Terus untuk apa ini diangkat jadi dirut, ini diganti aja manusia kayak *gini*, ngapain *gitu*. Bapak boleh pinter Pak, tapi hidup ini harus pinter-pinter, kalau tolol bilang tolol, kalau bodoh bilang bodoh, belajar *gitu loh*.

Jangan anda pikir anda paling pinter di sini *gitu loh*, undang-undang ini DPR yang membuat *gitu loh*, bukan Anda. Gaya anda bicara aja sudah *senga* apalagi anda duduk di situ *gitu loh*. Ini diganti Pak yang kayak gini, jangan ada lagi dirut kayak *gini*. Anda pikir anda udah pinter kali *gitu*, *nggak* ada kemajuan anda buat negara ini *gitu loh*.

Pak Jokowi sebagai pemimpin negara diundang sama lembaga ini aja datang, beliau menghargai bukan seperti anda. Nawacitanya beliau aja untuk membangun negeri ini *bener-bener* diliatkan *gitu loh*, dari semua sisi. Bukan seperti anda merasa sok pinter *gitu loh*, kamu keluar aja dari ruangan ini.

Saya minta izin Pimpinan, keluarkan aja manusia seperti ini, *nggak* perlu ada di ruangan ini dan *nggak* usah lagi jadi dirut *gitu loh*, ngapain jadi dirut kayak *gini*, pusing lah anggotanya kalau kayak gini dirutnya, dia yang salah orang lain yang disalahkan, ntar susah kita.

Saya izin Pimpinan, kita *nggak* usah mulai rapat ini sebelum ini keluar dari ruangan ini, *ndak* ada gunanya juga *gitu loh* karena sebagai pertanggungjawaban dari semua regulasi di sini Pak Wiko ada *gitu loh* dan ada 2 Dirut lagi harusnya hadir di sini.

Berapa dirut di bawah Pak Wiko, ada berapa? Harusnya kan ada lagi, mana lagi yang lain, terus kan ada wakilnya harusnya. Terus yang satu lagi mana? Ini sebagai apa, ini kan direksi di bagian Bapak aja, terus kan ada 2 dirut lagi mana? Yang nanganin Jawa Barat mana?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Didalam undangan hanya diminta PHM dan PHR saja Pak.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Memang undangannya hanya dua PHM dan PHR.

Oke Pak Nasir, saya kira kita sudah tangkap maknanya ya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya itu aja Pak Ketua, jadi kita luruskan dulu Pak Ketua biar *clear*, jangan gampang kita menerima regulasi mencemarkan nama baik DPR RI, *nggak gitu loh*. Orang yang seperti ini *nggak* udah ada di sini *gitu loh*, ngapain dia ada di sini, lihat mukanya udah pusing.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar, habis ini Pak Gandung dulu, tadi ada istilah *pinter minter* biasanya kan gitu.

Silakan Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih.

Jadi *tabayyun* itu perlu, tapi *tabayyun* sesederhana ini juga *nggak* bisa kita terima. *Tabayyun* perlu, baik bulan ramadan atau tidak ramadan itu penting. Tapi *tabayyun* kalau hanya seperti ini minta maaf itu bukan tidak setaraf dengan level jabatannya.

Jadi saya setuju apa bagaimana rasa biar merasakan, ini kita suruh keluar dulu tidak rapat ini, bagaimana rasanya *gitu*. Tapi *untuk* ke depan saya minta ini sebagai pelajaran, itu masih klarifikasinya belum menjawab apa kondisi real di lapangan itu Pak karena tadi saya mengikuti dari apa sebagian dari itu dalam kronologinya tidak sesederhana itu. Dilihat dari situ aja itu juga sudah bagian pelecehan dan *contempt of parliament*. Kita kemarin tegas dengan **BRIN** juga melecehkan, *nah* ini harus tegas juga.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya terima kasih Pak Gandung.

Ibu Ratna.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, mungkin saya ingin sekedar mengingatkan kepada seluruh mitra kami yang ada di Komisi VII bahwa kunjungan spesifik itu memiliki kekuatan yang sama dengan RDP maupun Raker hanya pelaksanaannya saja yang dipindahkan tempat, pertama itu.

Yang kedua Pimpinan, kami mengusulkan agar rapat ini diskor dulu sambil kita menunggu kronologi apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam karena tidak bisa menghadiri rapat saat itu karena kebetulan saya juga hadir sampai malam juga kami menunggu.

Dan yang ketiga, saat skor itu kami meminta kepada Bapak Direktur *Holding* agar segera memanggil yang bersangkutan untuk, beliau kan



pimpinannya. Pada saat itu saya ingat banget Pak Wiko kita tanya juga *nggak* ngerti alasannya apa. Jadi Pak Wiko juga dalam hal ini saya pikir bisa mengkonfirmasi, apakah benar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam itu serius dilakukan begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, terima kasih Bu Ratna.

Saya kira, *oh ya* Pak Jafar.

F-PKB (H. MARWAN JA'FAR):

Ini saya memperkuat Bu Ratna itu kita skorsing sebentar saja, nanti dilanjutkan lagi di ruangan Pimpinan, ngomong baik-baik Pimpinan dan beberapa teman yang kemarin ikut ke Kalimantan itu, di ruang pimpinan dulu sebelum rapat ini dimulai.

Saya kira bisa cepat selesai itu Pak Ketua, saya kira bisa cepat selesai teman-teman yang kemarin ke sana dengan Bapak-bapak ini segera kita rapat mulai ke ruang Pimpinan dulu, jangan dibawa begini, *nggak* bagus.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi begitu apa kita menuju, minta persetujuan bagaimana Bapak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Ya izin, izin. Hari ini saya sama, agak beda sama Pak Marwan ini, boleh ya.

Pak Marwan mungkin *nggak* ikut ke Kaltim waktu itu ya, wah beda Bang. Saya usul konkret ya, Pimpinan Komisi surat resmi ke dirut biar dirut ini juga *nggak* main-main soal begini ini.

Yang kedua, beliau saya kira tidak tepat ikut rapat pada hari ini.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya terima kasih atas berbagai masukan.

Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan demi.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, sedikit aja 1 menit.

Jadi saya terima kasih dikasih kesempatan 1 menit, buat rekan-rekan yang ikut kunjungan ke Kalimantan ya saya bisa memahami suasana kebatinan tapi di bulan suci ramadan ini bulan yang penuh berkah. Saya coba mengutip satu surat Al-Ashri, *wal ashri* demi masa "*innal-insaana lafii khusrin*", sungguh manusia dalam kerugian. "*Ilaladziina amanuu wa'amiluusshaalihaati watawaasaw bialhaqqi watawaasaw bisshobr*", kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.

Ini, ini saya kutip Pak di Google tenang aja, jadi memang *bener* kita mengkoreksi, saya sepakat, suasana kebatinan kawan-kawan juga saya sepakat. Memang sebaiknya rapat ini kita skor, kita bicara apa sebetulnya kendala yang tidak bisa hadir iya kan dan ini jangan terulang kembali Pak Dirut.

Dan apa yang disampaikan rekan kita Pak Karding, ini satu partai dengan Pak Marwan pun berbeda iya *kan*. *Bener* Pak Karding saya sepakat, bahkan Pimpinan harus membuat tertulis, ini jangan sampai terjadi lagi. Saya sependapat Pak Karding ya, saya juga sependapat dengan Pak Marwan diskor.

Jadi memang kita skor dulu Ketua, kita bikin poin-poinnya yang menjadi kesepakatan kita dan setelah itu mungkin kita bisa lanjutkan rapat kembali.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bagaimana?

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Falah Amru Pimpinan, setengah menit.

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi kita melihat apa yang disampaikan teman-teman tadi dan menghormati seluruh pendapat yang bagus, saya pikir tadi kalau Pak Kholid ataupun Pak Wiko menyampaikan permintaan maaf tentu sudah diawali dengan sebuah kebaikan. Tapi mungkin penjiwaannya tidak seperti WS Rendra Pak, mohon banget saya salah. Harusnya penjiwaannya begitu, sehingga Pak Nasir melihat itu kurang pas *gitu loh*.

Jadi saya minta diskor saja, sebentar saja 15 menit saja *kok* ya.

Terima kasih.



KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bagaimana, saya minta pendapat forum.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, seperempat menit ya tadi ada yang setengah, ada yang satu, ada yang setengah, ada yang seperempat.

Saya pikir itu Nasir, Nasril itu kan kaum-kaum penolong itu Pak. Itu bahasa-bahasa kaum-kaum penolong *kan* begitu Ustad Pak Marwan. Jadi Pak Nasir tadi telah meminta, kita berikan pertolongan kepada Pak Chalid karena suasana kebatinan yang kemarin *tuh* belum hilang ya, untuk kali ini biarlah Pak Chalid itu berada di luar dulu kan begitu, sehingga ini redam kan *gitu*. Pak Chalid tadi udah ketemu kami satu-persatu, udah minta maaf. Hari ini Pak Nasir minta kepada Pak Chalid biarlah Pak, hari ini Pak Chalid biar keluar dulu.

Nah selanjutnya rapat kita lanjutin, *nggak* apa-apa hari ini Pak Chalid menunjuk wakilnya silakan. Jadi berjalannya rapat juga karena mau diskor pun juga ini waktunya tidak memungkinkan, begitu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya dengan berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat dan itu yang perlu kita hormati. Pimpinan rapat mengambil sikap, dipersilahkan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam untuk meninggalkan rapat ini untuk selanjutnya nanti ada proses selanjutnya, begitu sepakat?

Dipersilakan Pak Dirut.

DIRUT PT PHM (CHALID SAID SALIM):

Oke, Pimpinan Rapat saya melaksanakan arahan, perintah.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah rapat kita lanjutkan, silakan kalau ada yang mewakili duduk situ tidak apa-apa karena ini kita personal bukan kelembagaannya.



Dipersilakan dilanjutkan Pak Wiko.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Terima kasih.

Izin melanjutkan presentasi kami mengenai kinerja PHE, khususnya di 3 bulan pertama. Kita mulai dari *slide* pertama Pak, ini hanya untuk *refresh* bahwa sejak 2021 Pertamina telah membentuk *holding sub-holding* secara efektif. Pertamina Hulu Energi ditunjuk sebagai *sub-holding upstream* kita berada di warna merah Pak, Pertamina Hulu Energi saat ini membawahi 5 regional, 4 di domestik dan 1 di internasional.

Di regional secara entitas yang mengelola blok di migas domestik ada PHR di daerah Sumatera, kemudian PEP sekaligus merangkap sebagai Direktur Regional 2 di Jawa Barat. PHI sebagai induknya PHM ada di Kalimantan Timur, kemudian Pepsi ada di Jawa Timur dan Indonesia Timur, termasuk Pepsi ADK ada di situ dan kami juga memiliki Pertamina Internasional EP atau PIEP yang mengelola aset di Aljazair, di Irak, di Malaysia juga kepesertaan saham 71% di perusahaan Perancis Maurel and Prom yang memiliki lapangan-lapangan di Afrika sampai ke Amerika Selatan.

Selanjutnya ada PDSI Pak, anak perusahaan kita yang bergerak di bidang *drilling*. Ada Elnusa anak perusahaan kita yang bergerak di bidang *upstream services* juga *downstream* dan kita memiliki PT Badak LNG yang bertugas untuk *me-liquefaction* gas dari Kalimantan Timur untuk dijadikan gas alam cair, dikirim ke konsumen kita baik di domestik maupun internasional.

Kami lanjutkan ke halaman kedua, berikut adalah *highlight* kinerja operasional kami di tahun 2022. Yang mana *highlight* ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga ketahanan energi nasional, sebagai *summary* pada tahun 2022 kita berkontribusi terhadap 68% *lifting* minyak nasional dan 33% *lifting* gas nasional.

Di tahun 2022 kami juga telah berhasil melakukan *onstream* pertama proyek strategi nasional di Jambaran Tiung Biru berupa *project gas*. Kemudian kami menjalankan *project OPLL* di Rokan stage 1 dan 2.

Kami juga telah menjalankan *waterflood* dan EOR dengan kontribusi 1800 barel oil per day di tahun 2022 dan kami melakukan kegiatan eksplorasi, dimana *success ratio* pada tahun 2022 adalah 64% menghasilkan tambahan *resources* sebesar 350 mmboi.

Kami juga peduli terhadap pengelolaan lingkungan, di mana pada tahun 2022 PHE Grup memperoleh 28 proper dengan 5 diantaranya adalah *proper emas*. Kemudian kami berhasil melakukan *trial CCOS* di *field* Jatibarang. ESD *rating* kita juga pada tahun 2022 meningkat peringkat 13 dari 143 perusahaan yang bergerak di bidang EMP, walaupun sebetulnya kita masih berada di kelompok *high risk* dengan skor 30 poin *something*. Dan yang terakhir PHE

juga melakukan kegiatan akuisisi dan *partnership* di, akuisisi di blok internasional dan *partnership* untuk CCOS.

Ke halaman ketiga, ini adalah *bar chart* yang menunjukkan kinerja kita Pak. Kita menampilkannya dari realisasi 2021, realisasi 2022, kemudian realisasi sampai dengan Bulan Maret 2023 dan besaran RKAP yang terakhir.

Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2001 ke 2022 produksi migas kita naik, produksi minyak kita naik sebesar 27%. Kemudian di 2023 target produksi kita kita naikkan dari realisasi 2022 menjadi 595.000 barel oil per day, artinya 5% lebih besar dari realisasi tahun 2022.

Sampai dengan triwulan 1, 3 bulan pertama produksi yang kita capai adalah 575.000 barel oil per day atau 2% di atas target *year to date*. Di mana kontribusinya 424.000 barel oil per day berasal dari produksi domestik dan 151.000 barel oil per day berasal dari produksi internasional.

Demikian juga dengan gas, target 2023, 5% lebih tinggi dari realisasi 2022 dan sampai dengan Bulan Maret 2023 realisasi produksi kita 6% di atas target yang ditetapkan dalam RKP. Setara barel oil ekuivalen per day realisasi produksi kita sebesar 4% di atas target *year to date* 2023.

Untuk mendukung kegiatan tersebut kita meningkatkan kegiatan eksplorasi dari realisasi tahun lalu hanya 17 umur menjadi 32 sumur, 28 sumur diantaranya ada di domestik dan sisanya ada di internasional. Kemudian ada sumur eksploitasi, kita rencanakan pemboran sumur 943 dibandingkan realisasi tahun 2022 yang hanya 689, sampai dengan triwulan 1 realisasi pengeboran kita 169 sumur.

Demikian juga dengan workover, target 2023, 688 ini lebih besar daripada target, realisasi 2022 yang sebesar 639, sampai dengan triwulan 1 kita telah merealisasikan 169 kegiatan *workover*. Yang terakhir *well intervention* dan *well services* target 30.159 ini lebih besar dari realisasi daripada tahun 2022 yang hanya 29.316 sumur. Realisasi sampai dengan Bulan Maret *year to date* sudah 7.176 kegiatan WWS kita lakukan.

Dari sisi biaya Capex yang kita *spending* dari tahun ke tahun terus meningkat, realisasi 2021 sebesar 2.580 atau 2,5 miliar dolar di 2021, realisasi 2022 menjadi 3,2 miliar dolar. Sementara di tahun 2023 kita targetkan kita membiayai *project-project* kita dengan Capex sebesar 5,7 miliar dolar Amerika.

Realisasi sampai dengan bulan Maret untuk Capex sudah 431 juta dolar. Untuk mendukung kegiatan tersebut kita dibantu oleh 73 *drilling risk* di seluruh Indonesia dan ada 133 *well intervention rate* dan diharapkan di 2023 kontribusi produksi kita menjadi 68% di minyak dan 44% di gas.

Lanjut, *slide* ini menggambarkan detail kegiatan kita, Pak. Jadi aktivitas kita *tuh* sebenarnya terbagi menjadi 4 kelompok, yang pertama adalah mengelola *baseline* aktivitasnya adalah mengelola *integrity* dan *reliability*, mengurangi *plant shutdown*, melakukan reaktivasi, melakukan optimasi dan

melakukan *filling the gap*. Dari sini kita menargetkan *baseline* bisa di-*maintain* pada angka 490.000 barel oil per day, sementara gasnya 2.475 mmscfd.

Kemudian *production growth* ini kita rencanakan berasal dari kegiatan *development drilling wells* dan *workover WWS*, serta *waterflood* dan EOR. Dari kegiatan ini ditargetkan kita memperoleh 91.000 barel oil per day dan 274 mmscfd.

MnA (*Merger and Acquisition*) di domestik dan internasional kita targetkan akan berkontribusi 15.000 barel oil per day pada produksi minyak dan 13.000 mmscfd untuk produksi gas. Sementara untuk penambahan riset dan *resources* grup ini kita canangkan dari program eksplorasi di tahun 2023 kita berencana mendapatkan 290 mmscfd.

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak Dirut, karena satu dan lain hal saya minta saya didampingi oleh salah satu dari Kapoksi PDIP untuk selanjutnya nanti, untuk selanjutnya nanti mungkin saya menyerahkan Pimpinan sidang ini kepada, minta persetujuan forum ya? Saya betul-betul ada sesuatu.

Iya mohon maaf, betul-betul mohon maaf saya, dengan segala kerendahan hati saya harus izin karena tadi sebenarnya sudah janji sama Pak Doni yang saling mengisi, tetapi beliaunya masih nyangkut macet di tol katanya, kurang lebih satu jam lagi baru masuk.

Sekali lagi saya limahkan Pimpinan Rapat ini kepada yang terhormat Pak Gunhar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Dengan mengucap "*bismillahirrahmanirrahim*" rapat saya lanjutkan.

Silakan dilanjutkan Pak Dirut.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik, kami lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini gambaran secara geografis di mana saja kegiatan-kegiatan kita dilakukan untuk mendukung target produksi yang telah kita canangkan.

- Di regional 1 di sini PHR berada, target untuk pemboran *development wells* ada 673, eksplorasi 11 sumur termasuk diantaranya 2 untuk minyak non konvensional, kemudian ada kegiatan *workover* 268 dan WWS 20.556.

- Regional 2, 37 sumur untuk *development wells* eksplorasi 5 sumur, *workover* 8 dan WWS 572.
- Demikian seterusnya sampai dengan regional 5 direncanakan kita melakukan pemboran pengembangan sebanyak 29 sumur, eksplorasi 4 sumur, *workover* 55 sumur dan WWS 1.005 sumur.

Berikutnya izin pada *slide* ini kami minta bantuan Dirut PHR untuk menyampaikan presentasi Pimpinan.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Izin Pak Ketua, untuk menjelaskan slide khusus untuk Pertamina Hulu Rokan.

Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Izin Bapak-Ibu sekalian, Anggota Dewan yang kami hormati, di *slide* ini adalah Rokan *performance* dari produksi di Blok Rokan. Di mana adanya penambahan sumur-sumur baru yang berkontribusi ke penambahan produksi, sebagai konteksnya mungkin kami tambahkan di sini bahwa di blok ini salah satu *challenge* yang besarnya adalah keterbatasan infrastruktur, kapasitas infrastruktur dan juga kapasitas dari *surface facilities* atau dari salah satunya pengolahan airnya.

Akan tetapi dengan ini, inilah hasil yang berhasil kami lakukan apabila kita tidak adanya investasi yang cukup itu setelah alih kelola yang digambarkan dengan garis berwarna biru itu akan mengikuti produksi mengikuti garis berwarna kuning. Apabila kita mengikuti investasi yang dilakukan oleh operator sebelumnya, di mana penurunan itu adalah 11% dalam 20 tahun terakhir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi Pimpinan, sebentar. Pak Dirut saya kan pernah datang ke sana dan kunjungan waktu reses. Ada bahan yang saya minta udah disiapkan belum, mana bahan yang saya minta waktu itu semua kegiatan yang sudah dilaksanakan?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Sudah Pak, kita sudah siapkan nanti.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Tolong dibagi aja ke teman-teman sekalian, karena kita mau mendalami juga pekerjaan yang sudah dikerjakan.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Untuk di *meeting* ini mungkin belum kami bawa Bapak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ya iya kita menunggu, Bapak bilang nanti akan dikirimkan, sampai sekarang kita udah rapat ini aja belum ada bahan.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Siap Pak, nanti akan kami langsung kirimkan Pak minggu ini juga.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nggak, kita mau bahas juga pendalaman supaya kita tahu apa yang sudah dikerjakan selama Bapak menjadi dirut, *gitu*. Supaya teman-teman juga tahu apa yang harus kita dalam untuk melakukan evaluasi di sini, apakah Rokan ini berhasil atau tidak, apakah ada permasalahan dengan regulasi yang dilakukan di lapangannya *kan*, sementara *kan* udah kita lihat banyak korban yang meninggal di sana.

Kita kan harus tahu juga nih sumber permasalahannya apa dan bagaimana melakukan kegiatan *gitu*. Jadi kami minta bahannya aja dulu *gitu* biar didalam juga dengan seluruh Anggota Komisi VII.

Mungkin itu Pak, tolong disiapkan aja, supaya kita tahu apa yang mau kita dalam dalam realisasi ini bukan. Kalau ini kan *ceremonial* aja dia kalau tercapai, kalau *nggak kan* nanti tapi kan kita mau tahu berapa pembiayaan yang dilakukan selama setahun, apa regulasi yang dilakukan di sini dan apa keberhasilannya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana sistemnya. Coba tolong datanya itu Pak yang kita minta waktu itu.

Saya bersama Kapolda dan Kajati waktu itu kunjungan tempat beliau, jadi saya minta datanya tolong disiapkan dulu. Itu kan minta tempo akan dikirimkan, saya sampai hari ini belum menerima data itu. *Nah* tolong disiapkan aja Pak Dirut biar kita bahas sekalian melakukan pendalaman regulasi ini.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Siap Bapak, kami siapkan Pak, datanya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Mungkin itu Pimpinan.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Izin Bapak dilanjutkan, terima kasih Bapak, nanti.

Terima kasih Pak Nasir, nanti akan kami siapkan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bahannya berapa lama?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Kalau untuk yang Rokan ini hanya 1 *slide* ini Bapak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya terus bahan yang saya minta untuk melakukan pendalaman itu.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Izin, kami siapkan dulu Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya, waktu rapat itu Bapak bilang mau siapkan, kita nunggu, belum siap. Sekarang sudah rapat 1 bulan di sini belum siap, terus mana bahannya.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Pak, belum kami bawa untuk *meeting* ini Pak mengingat agendanya, nanti kami siapkan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya *meeting* ini kan melakukan pendalaman juga kita, bagaimana regulasi yang Bapak lakukan di sana itu. Bapak jelaskan habis ini terus berapa lama kita nunggu data itu, *kan* kita mau mendalami ini.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Untuk di bawa ke *meeting* ini belum siap kami, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus, jadi kalau saya mau bilang di situ ada kelakuan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku gimana? Terus datanya mana yang mau kita bahas. Jadi kalau Bapak cuman *gini* aja menjelaskannya, terus bagaimana fungsi pengawasan yang kita lakukan.

Regulasi yang sudah Bapak laksanakan kan kami mau lihat, apakah benar atau tidak? Itu kan data yang saya minta kemarin, *gitu*. Jadi nanti sama

gitu Pak, kalau Bapak juga *nggak* bisa menghargai ruang rapat ini *kan* pusing jadinya kita.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Pak kami mengerti Pak, mohon maaf kami belum.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ya datanya Pak, Bapak siapkan berapa lama inikan ada tim-tim Bapak *nih* di belakang, *kan* semua pegang sistem ini, mana datanya. Selama setahun mana kegiatan yang dilakukan, berapa lama?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Ini Pak, saya coba lihat dulu *slide* ini Pak, yang ada Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kan ada regulasi 1 tahun yang sudah anda kerjakan berapa penyerapan anggarannya, berapa regulasi yang sudah dikerjakan dari penyerapan anggaran yang tersedia, berapa regulasi yang terlaksana dari anggaran tersedia, mana kegiatannya?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Bapak, kami ada Pak, mungkin minta waktu sebentar Bapak untuk.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Oke.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT(GUNHAR):

Jadi gimana Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kalau *nggak* skor aja dulu Pimpinan, sambil nunggu sebentar setengah jam atau jelaskan dulu.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Dijelaskan aja tapi timnya biar berjalan menyiapkan, jalan tengah *toh* "*wal-ashri*" *toh*.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya begitu Pimpinan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinannya *nggak* tegas *tuh*.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Belum permanen Pak De, silakan Pak Direktur PHR untuk dilanjutkan dulu paparannya sembari tim yang di belakang menyiapkan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Bapak, terima kasih Pak Ketua kami teruskan dulu Pak sembari datanya disiapkan.

Untuk di *slide* ini Pak bisa kami sampaikan bahwa untuk melihat di garis hijau Pak itu adalah kalau mengikuti investasi yang dilakukan oleh operator sebelumnya, rata-rata penurunannya produksi turun 11% per tahun selama kurang lebih 20 tahun terakhir.

Akan tetapi dengan investasi yang kami lakukan di blok Rokan yang nanti akan saya sampaikan datanya itu dengan melakukan perbaikan sumur-sumur lama dan melakukan pengeboran sumur-sumur baru produksi itu bisa mencapai di sekitar 160-an Pak, 160.000 barel oil per day. Bahkan sempat mencapai puncaknya itu di 166.000 barel minyak per hari.

Jadi kalau kami lihat Pak, investasi yang kami lakukan adalah dari 9 rig di saat alih kelola sekarang sudah menjadi 26 rig Pak hampir tiga kali lipat. Sedangkan untuk WOS rig itu dari 25 menjadi 51 Pak, sudah menjadi dua kali lipat penambahan rig-nya.

Di situlah ada penambahan dari sumur baru per bulan Maret 2023 di grafik ini adalah sampai Maret 2023, itu penambahan dari sumur baru sekitar 33.000 barel minyak per hari, sedangkan dari WOW itu sekitar 20-25.000 barel minyak per hari penambahannya. Jadi total sekitar 50 sampai 55.000 barel minyak per hari yang ditambahkan dari kegiatan yang dilakukan oleh PHR.

Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan di untuk *slide* yang ini sembari nanti yang datanya Pak kami sampaikan.

Terima kasih, Bapak.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Silakan Pak Wiko.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Izin melanjutkan ini tinggal *slide* terakhir Pak, menunjukkan komitmen kita sebagai *sub-holding upstream*. Yang pertama adalah bahwa kita berkomitmen untuk berkontribusi terhadap produksi nasional dengan mendukung program target nasional produksi nasional 1 juta barel oil per day dan produksi gas 12 mmscfd.

Kemudian kita juga memberikan *multiplier effect* kepada negara dan masyarakat dengan berkontribusi kepada peningkatan bagian negara, devisa dan perekonomian daerah. Yang terakhir tentu saja dalam melakukan kegiatan ini kita membutuhkan dukungan, berupa stabilisasi regulasi untuk kemudahan investasi dan dukungan pada isu-isu landas kontinen dengan negara di sekitar kita, kebetulan kita ada isu di Ambalat.

Saya kira saya sampai pada halaman terakhir dari presentasi kami Pak, mohon masukan dan arahan.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Baiklah, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya.

Selanjutnya sebelum masuk tadi ke teknis pembahasan soal PHR ya, sebelum melakukan pendalaman dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan selanjutnya saya berikan kesempatan yang pertama kalau di catatan Pak Ketua ini, Fraksi PDI Perjuangan. Ini Pak Gus Falah ada, boleh kita kasih ke Pak Gus Falah dulu.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Direktur PHE,
Yang saya hormati Direktur PHR dan seluruh yang hadir di ruangan rapat Komisi VII ini.

Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kinerja PHE, di mana di bulan Januari-Februari 2023 kita telah mencatat 576 mbopd untuk minyak dalam hal ini naik 2%. Yang kedua, saya juga mengapresiasi atas kenaikan 2.785 mmscfd gas 6% dan ini semua karena juga faktor ada 118 sumur yang sudah mulai di *explore*.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Dirut PHE, beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat PHM. PHM ini kalau kita cermati secara mendalam sesungguhnya minyak ataupun gas di dalamnya uratnya kan

berbelok-belok, setahu dan sekecil pengetahuan saya, uratnya itu berbelok-belok.

Sehingga ada beberapa waktu yang lalu ketika pengeboran eksplorasi itu ada sebuah alat yang tidak bisa masuk sehingga alat itu bengkok. Apakah itu juga salah satu yang menyebabkan, sampai dipanggil Pak Luhut itu seingat saya. Itu alat juga yang menyebabkan peningkatan *lifting* kita ini agak sedikit menurun *gitu loh*, kalau itu iya, mohon interaktif Pimpinan barangkali bisa dijelaskan. Kalau itu iya, apakah ada sebuah solusi yang lebih, lebih paten *gitu loh*. Apakah sebuah alat yang digunakan untuk *explore* bor minyak itu tadi, ini tadi yang lebih bagus.

Monggo Pak Dirut.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik, terima kasih.

Yang Bapak maksudkan itu adalah pipa domestik Pak buatan dalam negeri di Batam. Memang ketika kita pergunakan di Mahakam yang kondisi lapangannya itu sifatnya rawa masih kurang cocok, namun demikian kita kemudian melakukan uji coba dilakukan di PHKT dan itu berhasil dilakukan di PHKT, Pak. Untuk Mahakam sendiri kita terus akan upayakan, apakah memang nanti bisa kita pergunakan lebih lanjut, Pak.

Secara umum ini tidak berkontribusi terhadap produksi dari PHM, hanya saja memang komitmen kita untuk menggunakan pipa dalam negeri itu menjadi hal yang memang harus kita maksimalkan.

Demikian Pak.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Baik, terima kasih Pak Dirut.

Artinya *next* kita memang harus menggunakan yang pipa ataupun alat yang lebih *prefer gitu* Pak ya, sehingga kita juga bisa menjalankan apa yang kita inginkan *lifting* gas kita ini, memang *lifting* minyak kita bisa naik dan kalau *toh* sekarang kita apresiasi tentunya ke depannya lebih kita apresiasi.

Ada juga yang dari Rokan, saya pikir Rokan ini juga gerakanya juga harus lebih dinamis Pak Buyung ya karena saya lihat di Rokan masih banyak persoalan yang menumpuk, persoalan-persoalan yang belum terselesaikan.

Sehingga hal-hal yang perlu kita ambil langkah tentunya menjadi sesuatu yang lebih baik, kayak berita-berita kemarin walaupun kita memahami itu tidak ada di lokasi di Rokan ya, itu memang ada di wilayah Rokan tapi itu adalah fasilitas dari pihak lain, pihak lain terjadi yang meninggal ada tiga orang ya kan.

Nah hal-hal seperti ini saya minta juga Pak Dirut PHE untuk lebih dicermati lebih mendalam, supaya juga tidak terjadi yang menyinggalkan kasihan juga meninggalkan anak-istri, ada tiga orang kemarin menyinggalkan supaya tidak terjadi lagi *gitu* ya.

Walaupun itu bukan kesalahan dari pihak PHR tapi yang menjadi sorotan itu dikau Pak Buyung, yang menjadi sorotan itu dikau, bukan si A, si B, si C, tapi PHR-nya. PHR itu membawa nama baik PHE, PHE membawa nama baik Pertamina *gitu*. Jadi saya minta itu pengawasan *sampean* di PHM-nya itu lebih tajam.

Terima kasih, gitu aja Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Terima kasih luar biasa Gus Falah dari PDI Perjuangan.

Selanjutnya saya silakan dari Fraksi Partai Golkar, ada Pak Muchtar, Pak Gandung.

Oke mari, silakan Pak Gandung, *oh* Pak Mukhtar, kita *hold* dulu ya. Kita lompat ya Fraksi Partai Gerindra? *Nggak* ada.

Dari Fraksi Partai Nasdem, silakan.

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Terima kasih Ketua, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota,
Yang saya hormati Pak Dirut PHE Pak Wiko, Pak Wiko ini kayaknya orang Medan ini, bukan ya, lama di Medan dan Dirut Hulu Rokan dan seluruh jajaran yang hadir.

Pak Wiko dan Pak Dirut Hulu Rokan, saya sedikit saja, ingin menanyakan tentang kinerja Pak. Saya mendapat data tentang anak perusahaan dari PHE, jadi yang saya dapat ini data dari 2020 Pak, kan ada puluhan anak usaha Pak milik PHE.

Ada di berbagai provinsi itu, ada di Kampar, ada di Riau, ada di Sumatera, ada di beberapa provinsi. Jadi yang data yang ada ini ada yang konvensional Pak ya, yang operator ada 26 usaha, ada yang konvensional Bapak buat non operator ada 12 perusahaan anak usaha. Ada juga Bapak buat non konvensional, non konvensional tapi dijadikan operator di Sumatera Utara, ada juga non konvensional Bapak buat non operator, jadi ada operator, ada

tidak operator ada 5 perusahaan. Dan ada 18 yang tidak aktif Pak ya Pak, posisi sekarang itu.

Yang saya mau minta penjelasan Pak Wiko ini Pak, kan ini juga banyak nanya ke saya. Dari anak perusahaan konvensional, non konvensional ini gimana teknis kerjanya Pak *gitu* dan operasionalnya *gitu*. Bapak bagaimana mengarahkannya, apakah ini, anak usaha ini tujuannya didirikan sampai puluhan ini Pak untuk mencari laba usaha, atau pengembangan usaha, atau bagaimana Pak *gitu* mohon penjelasan Pak Wiko *gitu*.

Dan bagaimana setoran deviden ke negaranya ini Pak, kalau namanya perusahaan perseroan BUMN ini kan kita negara minta deviden dan bagaimana pajaknya ke kas negara *gitu* dari puluhan anak usaha konvensional dan non konvensional, operator dan non operator Pak *gitu*.

Kemudian data yang saya dapat dari PHE ini Pak, dari 2021 sampai 2023 ini kan pendapatan PHE ini lumayan Pak, ini perusahaan yang menguntungkan *gitu* sampai 2 miliar dolar ya Pak ya pendapatannya, dengan laba bersih sampai hampir 300 juta US dolar Pak atau lebih dan total asetnya 6 miliar dolar, ekuitasnya 2,9 miliar dolar.

Nah itu Pak Wiko, saya ingin penjelasan banyak rekan-rekan juga media bertanya kepada saya supaya jangan salah saya nanti menjelaskan, saya ingin dari Pak Wiko baik secara lisan atau tertulis *gitu* Pak. *Gitu* Pak Wiko.

Kemudian yang kedua Pertamina Hulu Rokan yang hadir di sini, yang satu lagi tadi diusir ya Pak ya. Pertamina Hulu Rokan ini kan dari 2018 Pak berdirinya Pak Dirut ya dan di sini di undang-undang diberi amanah mengelola minyak dan gas Pak, khusus minyak dan gas. Dan terutama Blok Rokan, Blok Rokan itu merupakan tempat produksi kilang minyak dan gas terbesar Pak, penghasilan terbesar di Indonesia ya Pak ya, *nggak* saya, terbesar katanya di Indonesia, betul? Data yang saya dapat Pak.

Interaktif Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Silakan Pak.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Izin Pak, kalau minyak nomor 2 Pak.

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Terbesar ya Pak ya, gas?

DIRUT PT PHR (JAFEE A.S):

Kalau gas tidak ada Pak.

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):

Jadi merupakan produksi minyak terbesar di Indonesia kedua, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suplai dalam negeri Pak. Itu yang undang-undang aturan dari 2018 Pertamina Hulu Rokan berdiri.

Yang saya mau minta penjelasan Pak Dirut, sampai saat ini itu berapa produksi barel per hari, perbulan, per tahun yang untuk kebutuhan dalam negeri *gitu* Pak karena ini kan undang-undangnya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri ini Hulu Rokan, Blok Rokan dan yang berikut, apakah ada yang Bapak ekspor *gitu* produksi minyak yang didapatkan dari Blok Rokan ini.

Itu saja dulu Pak karena ada kawan-kawan yang lain, mohon tertulis dan lisan.

Terima kasih saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Iya terima kasih Pak Rudi Bangun dari Fraksi Partai Nasdem.

Berikutnya dari Fraksi PKB, silakan.

F-PKB (H. MARWAN JA'FAR):

Saya sedikit aja nanti diambil Pak Karding.

Terima kasih Bapak-bapak sekalian dan Rekan-rekan semua yang berbahagia.

Tadi kalau saya tidak salah mendengar Pak Wiko menyebut-nyebut tentang rig itu, masih berapa sih Pak yang dibutuhkan rig untuk kebutuhan di perusahaan Bapak itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal pipanisasi itu masih berapa yang harus dibutuhkan pipanisasi dan modelnya model apa dan speknya berapa untuk dalam rangka memperlancar proses penyaluran minyak dan gas itu.

Dan yang terakhir, di daerah mana semua Pak yang dibutuhkan kedua barang itu tersebut.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih singkat.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Bagaimana Pak Karding mau menambahkan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Baik, terima kasih.

Pimpinan, Pak Wiko kemudian Pak Buyung dan yang mewakili Pak Chalid tadi.

Yang pertama, saya kira apresiasi ya ada peningkatan produksi yang terjadi selama ini dan itu menurut saya baik. Walaupun tidak begitu besar tapi satu kemajuan di tengah kesulitan kita untuk menambah produksi ya, itu saya kira kita harus apresiasi.

Yang kedua, mungkin perlu ada satu tata kelola atau sistem baru agar tidak sering terjadi kecelakaan ya. Ini menjadi satu masalah karena lama-kelamaan satu karena ini menyangkut nyawa manusia, yang kedua menyangkut citra *brand* perusahaan akan menurun sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan ke depan.

Saya kira teman-teman di PHE maupun di PHR Mahakam itu sudah punya satu rencana perbaikan, saya pingin tahu aja sebenarnya dari sisi pengamanan dengan konteks teknologi. Yang kedua, tata kelola sumber daya manusia.

Saya khawatirnya itu jangan-jangan pekerja-pekerja lapangan ini gajinya terlalu rendah, sehingga ada deviasi yang tinggi dengan, dengan apa namanya di level-level manager dan sebagainya.

Coba dicek Pak, saya kemarin diskusi dengan beberapa teman dari Pertamina, saya tanya kenapa *sih* kasus-kasus ini sering berulang? Memang satu mungkin karena alatnya sudah apa namanya sudah tua ya, yang kedua mungkin karena teknologinya tidak di-*update* terus-menerus, yang ketiga bisa jadi karena tata kelola sumber daya manusia salah satunya soal kesejahteraan, ini kuncinya kan.

Saya *nggak* tahu apa benar apa tidak, tapi itu kan info, info sama orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi di Pertamina kan, jadikan lebih objektif saya kira mereka.

Itu yang pertama, jadi saya mendorong harus ada konsep ya Pak Wiko dan Pak Buyung, harus ada konsep dua hal yang saya sampaikan tadi, sistem. Saya tidak tahu bahasa teknisnya karena saya bukan orang industri ya, tapi sistem pengamanan yang kira-kira mudah kita deteksi dan sekarang ini kan sudah banyak sistem ya, sudah banyak alat yang bisa mendeteksi.

Misalnya tingkat korosi berapa, penyelesaiannya kayak apa langsung pada saat itu bisa dicek, kayak orang perbaiki mobil itu kan, cek-cek, *oh* ini ada masalah, ini ada *potnya*, ada macam-macam rusaknya misalnya, tekanannya

terlalu, pompanya dan sebagainya. *Nah* ini saya kira harus yang lebih bagus lah, yang lebih *advanced* lah walaupun memang investasinya pasti gede.

Lalu yang kedua, tata kelola sumber daya manusia ini harus disiapkan betul Pak biar ke depan ini bagus, tidak banyak kejadian ya walaupun tentu banyak di luar kontrol kita. Tapi kan di manajemen yang *bener* itu tidak boleh ada sesuatu apapun, tidak di bawah kontrol kita dan harus dalam kontrol kita. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya mendukung ya Pak Wiko tadi untuk mengupayakan betul-betul penggunaan pipa dalam negeri karena itu memang semangat kebangsaan kita hari ini. Mendorong agar penggunaan TKDN ini tinggi, itu penting Pak, mungkin kalau beda harga sedikit saja *nggak* apa-apa kita utamakan TKDN, yang penting teknologinya yang lain sama, kekuatan, kualitas dan lain sebagainya sama.

Jadi menurut saya harus mulai kita ada rasa nasionalisme yang tinggi untuk mencoba menggunakan produk-produk dalam negeri, seperti iklannya apa itu Mitsubishi atau apa itu yang di Jawa Timur itu. Jadi harus kita gunakan produk-produk yang memang produksi anak negeri, tapi jangan dipaksakan, kalau tidak bisa ya sudah.

Kalau istilahnya Pak Arif Hidayat itu kalau dalam pemilu di-*hybrid* itu bisa di-*combine* ya kan, Bapak setuju di-*hybrid* ya, *oke* katanya di-*combine*. Saya kira kita juga tidak bisa *full* ya. *Nah* oleh karena itu dua itu yang menjadi catatan saya.

Yang ketiga Pak Wiko ini mumpung ketemu, kejadian yang terjadi dengan Pak Dirut Pak Chalid tadi itu, itu harusnya dibawa kontrol Pak Wiko loh Pak karena itu pasukan bapak itu. Jadi *nggak* boleh lagi terjadi seperti itu, ini saya tadi *nggak* ngomong banyak karena orangnya sudah *anu*, jadi saya sampaikan.

Lain kali Pak Wiko *nggak* boleh terjadi seperti itu Pak, masa ada dirut di bawah *panjenengan* *nggak* datang tanpa alasan, tanpa apa, tanpa apa, *nggak* boleh itu Pak karena itu melecehkan parlemen secara institusi Pak, bukan kita minta dihargai ya. Tidak ada niat untuk minta dihargai, di orangkan pun tidak tetapi kita bekerja berdasarkan konstitusi, undang-undang. Orang yang tidak memberi kabar, orang yang tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas, dengan undangan resmi *official* maka itu disebut *contempt of parliament*, masuk kategori itu.

Oleh karena itu, karena itu di bawah kontrol Pak Wiko mestinya Pak Wiko bisa menahan itu, jangan sampai ini terjadi. Kalau kejadian seperti inikan tidak baik, jadi semua harus dalam kontrol Pak Wiko selaku Dirut PHE, jangan sampai terjadi ke depan.

Segala tindakan-tindakan yang dianggap merugikan, termasuk pada tata kelola sumber daya manusia juga harus dibawah komando Pak Wiko. Kita

support Pak, jangan sampai ada banyak kejadian yang apa namanya yang bolong-bolong itu.

Terima kasih, mohon maaf.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Terima kasih Bung Karding dari Fraksi PKB, yang sudah ditambahkan Pak Marwan sudah keluar.

Berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih Pimpinan kita yang baru luar biasa, suasana menjadi *cool* karena dalil-dalil ayat tadi kayaknya.

Terima kasih Pimpinan.

Para sahabat yang kami hormati.

Saya ingin menambahkan beberapa begitu Pak Dirut PHE, jadi pertanyaan begitu Pak PHE, PHM dan PHR. Terkait pencegahan *accident* karena kan Pertamina banyak mengolah sumur-sumur yang sudah senior gitu ya, sudah tua lah, senior dan senior sekali begitu.

Nah yang saya tanyakan gitu, apakah di tahun 2023 ini ada rencana untuk peremajaan maupun modifikasi sumur atau kilang pada lokasi masing-masing dan apabila ada mekanisme teknis seperti apa yang akan dilakukan. Tentu ini kan seiring dengan apa pencapaian target *lifting*-lah begitu, kita ketahui *lifting* kita ini semakin tahun semakin *decline*-lah kurang lebih begitu, yang tadinya kita pernah mencapai 1,4 juta barel sekarang tinggal 600 ini juga harapan kita bisa menambah daripada target *lifting* kita. Dan yang saya tanyakan, apakah akan mengganggu eksploitasi atau bagaimana? Tolong nanti diberikan penjelasan tentang itu.

Kedua, juga pertanyaan saya terhadap PHE terkait Jambaran Tiung Biru JTB, ini adalah proyek strategis nasional, potensi gasnya besar tapi saya mendengar terkait penyerapan gasnya belum maksimal. Saat ini nyatanya *buyer* sudah kontrak dan siapa saja, dan besarnya berapa, juga apakah sudah terserap maksimal hal tersebut.

Apabila penyerapan belum maksimal, kira-kira rencana apa kedepannya atau seperti apa kurang lebih. Saya mendengar PGN dan PLN saja yang menyerap gas dari JTB dan penyerapannya belum maksimal. Mohon juga diberikan penjelasan.

Sementara itu dulu nanti mungkin ada penambahan, Bang Nasir maupun Pak Hendrik.

Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Silakan Pak Nasir mau menambahkan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, teman-teman Anggota Komisi VII, Dirut Pertamina Hulu Energi dan seluruh.

Sedikit mungkin saya menambahkan, penyampaian saya tadi, saya izin interaktif Pimpinan.

Pak Dirut tadi Bapak jelaskan bahwa 160.000 itu per hari, itu dari Rokan saja atau seluruh wilayah Rokan?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Izin Pak, dari Blok Rokan ini Pak, dari blok 100 % dari Blok Rokan Pak, dari Blok Rokan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Di luar yang Rokan mana lagi blok yang Bapak kerjakan.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Di seluruh blok di Sumatera Pak, ada di, di zona 4 itu di Prabumulih di Sumatera Selatan dan beberapa lapangan di sana.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Itu berapa hasilnya?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Kalau di, di Sumatera Pak di luar Rokan itu total minyak sekitar 42.000 barel minyak per hari dan gasnya 700 mmscfd Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Itu termasuk yang Rantau?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Termasuk Pak di Rantau iya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Berarti yang 160.000 ini khusus Rokan.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Khusus Rokan Bapak, yang Blok Rokan, iya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya ini menerima masukan dan dari berita media juga yang saya *input*, kegiatan yang dilakukan di Rokan ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, berapa jumlah seluruh kegiatan yang dilakukan per tahun untuk meningkatkan regulasi mencapai 160.000 tadi, berapa jumlah kegiatannya, penunjangnya semua, seluruhnya.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Sumurnya sekitar 600 sumur Pak untuk tahun ini saja, untuk tahun 2022 itu di sekitar di 404 sumur Pak, di tahun 2021 itu sekitar 132 sumur Pak dalam 4 bulan pertama, 4 bulan alih kelola pertama itu sumur yang kami lakukan Pak. Untuk kegiatan di luar, untuk perbaikan-perbaikan sumur-sumur baru Pak itu bisa mencapai sekitar 20.000 kegiatan Pak, totalnya dalam setahun Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

20.000?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Kegiatan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Itu semua punya nilai kontrak?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Pak, itu dikerjakannya bersama-sama dengan mitra kerja Pak, tapi kontraknya bukan 20.000 ya Pak ya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya mau tanya berapa nilai kegiatan yang dikontrakkan dari seluruh regulasi pertahun.



DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya kalau dari *budget* tahunan Pak ya, per tahun itu di 2022 Pak itu investasi itu sekitar 530 juta, Pak. Sedangkan untuk operasional tuh sekitar 1,5 miliar dolar, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pak yang untuk kegiatan tadi berapa jumlah pelaku kegiatannya.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Perusahaannya Pak ya?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Mungkin puluhan mungkin bahkan lebih dari 100 Pak itu Pak jumlah pelakunya Pak untuk semua kegiatan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Dicek dulu Pak, berapa banyak.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Angka tepatnya izin saya cek Pak ya. Pak di sini lagi kami lihat angka totalnya Pak untuk total seluruh kegiatan di Blok Rokan.

Untuk sumur-sumur baru Pak, itu ada 11 mitra kerja Pak untuk yang sumur baru saja Pak ya untuk rig-rig tadi.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus yang rig-rig lama?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Untuk rig lama.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Rig-rig baru ini yang mengerjakan kegiatan, yang mengerjakan ini kontraktor-kontraktor yang lama juga.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Ini maksudnya rig baru Pak, maksudnya rig yang mengerjakan untuk sumur-sumur baru Pak, jadi rignya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya lah berarti kan kontraktornya ada *kan*?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Ada Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nah ini kontraktornya yang pekerja-pekerja yang sudah memiliki kontrak di situ juga.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Kombinasi Pak, jadi ada yang.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Yang saya tanya aja Pak, yang saya tanya apakah mereka pekerja yang sekarang udah aktif yang Bapak perpanjang melalui peralihan dulu, terus dia dapat lagi pekerjaan baru di situ atau *gitu*.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Ada yang seperti itu, ada juga tambahan Pak. Jadi tidak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ada BUMN yang mengerjakan juga?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Kalau dari 11 mitra kerja hanya satu Pak, yang untuk rig tadi Pak hanya satu yang dari BUMN yaitu PDSI, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

PDSI, di sini Bapak tunjuk?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Yang khusus PDSI saat ini Pak ini ditunjuk langsung, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kenapa dia ditunjuk?

DIRUT PT PHR (JAFEE A.S):

Untuk, inikan 1 dari 11 Pak ya ini hanya untuk sinergi BUMN, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bapak tahu *nggak* kalau karena sinergi itu nanti ada korupsi dan itu *kan* peluang korupsi sekarang di situ. Bapak *bener* *nggak* *bener* mereka yang mengerjakan atau pakai sub-kon lagi, sub-kon itu yang mengeluarkan biaya baru mereka hanya administrasi.

Itu *kan* namanya memperluas dan membuka ruang korupsi di situ seluas-luasnya, *nah* kenapa terjadi seperti itu atau sistem yang dibangun BUMN untuk membangun korupsi sebesar-besarnya di BUMN. *Nah* kenapa *nggak* diberikan sama yang mengerjakan yang dikontrakkan oleh anak perusahaan BUMN tadi, *kan* lebih bagus dia yang mengerjakan.

Secara profesional dia pakai biayanya dia sendiri, secara profesional dia yang punya peralatan sendiri, *nah* kenapa *nggak* dia yang dimenangkan, kenapa harus menunjuk anak perusahaan BUMN, apa masih ada preman atau tukang palak di BUMN ini.

Ini terjadi Pak, *nah* ini yang saya tanya sekarang kenapa ditunjuk, berapa banyak sekarang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022, saya minta datanya. Saya minta Pimpinan, izin Pimpinan mungkin teman-teman sekalian, kita bentuk panja saja Blok Rokan ini. Kita biar bedah berapa regulasi pengadaan yang dilakukan penunjukan di Blok Rokan ataupun di bawah Pertamina Hulu Energi ini karena saya melihat *nggak* *bener*.

Yang mengerjakan orang yang punya modal, yang mengerjakan orang punya alat, *nah* anak perusahaan ini buat apa ditunjuk? Kalau cuman ngemplang-ngemplang uang dari keuntungan hasil keringat orang lain. *Nah* ini banyak sekali Pak, peralihan waktu Rokan diambil alih oleh Pertamina, Chevron diambil alih oleh Pertamina perpanjangan kontrak ini runtunnya panjang sekali dan tidak ada evaluasi.

Saya *nggak* ngerti ini pola mana yang dipakai gitu loh, aturan mana *gitu* *loh*. Negara ini berdiri dasar undang-undang, *nah* hukum di Indonesia itu cuman satu, hukum, *nggak* ada hukumnya Pertamina.

Saya minta Pak berapa jumlah perusahaan yang Bapak tunjuk anak perusahaan BUMN selama 2022, izin interaktif Pimpinan. Ada juga perusahaan yang bermasalah sampai hari ini pembangunan pipa 4,2 triliun, sampai hari ini jadi pembicaraan media dan Bapak belum jawab sampai, berulang-ulang saya tanya. Pak Buyung itu, Pak Dirut itu sudah dijalankan belum? Sebagian Pak, itu jawaban Bapak sama saya.

Kenapa sebagian? Itu Dirutnya dulu yang ngerjakan Pak Wiko ini, anak perusahaan dari PGN. *Nah* itu saja belum tuntas 4,2 triliun, 4,2 triliun *kan* anggarannya pipa itu, Pak Dirut jangan lupa nanti keluar dari ruangan ini.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Pak, itu *kan* yang membuat dari Pertamina Pak anggarannya, anggaran pembuatannya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Yang membayar proyek itu siapa?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Kami membayar biaya sewa Pak, *tol fee* untuk pipa tersebut.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya sekarang kalau Bapak bayar, kalau alat itu dibayar tidak sesuai gimana? Itu *nggak* jadi temuan, *kan* nilai proyek itu 4,2 triliun. Ini Pertamina ini anak perusahaan BUMN *nggak*? *Kan* anak perusahaan BUMN, saya minta Pak berapa yang Bapak tunjuk 2022, mana datanya, bagaimana kesimpulan bisa menunjuk itu tolong dijelaskan di sini. Kalau cuman bilang sinergi BUMN, saya *nggak* ngerti.

Ada lagi satu kegiatan yang dilaporkan ke kami, menunjuk sistem kesehatan yang dirutinitaskan di Rokan ini dengan berapa rumah sakit, tapi rumah sakitnya itu saja yang ditunjuk padahal yang ditawarkan tidak ada menunjuk pagu dana berapa nilai kegiatan itu, tapi itu terus yang ditunjuk *gitu loh*.

Kalau yang menawarkan lebih mahal itu alatnya lebih bagus dan lebih canggih dan lebih berpotensi untuk memperbaiki kesehatan orang, *kok* kenapa *nggak* ditunjuk, ada apa sebenarnya di Rokan ini. Apakah tadi kecelakaan itu karena peralatan yang kontraktornya sudah itu saja alatnya *nggak* diganti-ganti karena menjadi kecelakaan lah itu, bisa jadi.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Sebentar Pak Gandung, saya tanya dulu Pak Nasir lagi jatahnya Pak Nasir ini. Saya tanya dulu ke Pak Direktur Pertamina Hulu Rokan, yang data diminta Pak Nasir tadi udah siap belum? Kalau belum siap, kita *hold* dulu Pak Nasir sebentar Pak Nasir karena *kan* ada beberapa kawan-kawan fraksi yang

belum menyampaikan, nanti bisa ditanggapi yang terakhir Pak Nasir, begitu cocok?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan saya mau nanya yang ditunjuk dulu tadi yang di PLPL tadi.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Iya nanti disiapkan, datanya belum ada ini.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan itu beda yang kita tanya tadi, yang saya tanya sekarang berapa jumlah perusahaan anak perusahaan BUMN yang ditunjuk langsung di perusahaan Rokan ini.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Udah bisa dijawab Pak?

DIRUT PT PERTAMINA HULU ROKAN (JAFEE A.S):

Belum Pak, masih kami.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Katanya sistemnya bagus.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Nah ini datanya kurang lengkap juga Pak Direktur Hulu Rokan ini, jadi gimana Pak Nasir kita lanjutkan dulu dengan yang lain nanti Pak Nasir bisa leluasa, seluas-luasnya kita buka ruang, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya juga kan punya kegiatan yang lain.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Pak, bisa jawab.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ROKAN (JAFEE A.S):

Untuk yang data BUMN masih belum Pak, karena untuk data berapa BUMN yang sekarang tingkat kontrak dengan Rokan Pak, ini lagi.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pak Dony, co-pilot dulu.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Ya co-pilot. Sebentar.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Ini baru penjajakan.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Karena ini sudah ada Pimpinan yang asli Pak, kami mundur dulu.

Terima kasih Pimpinan, rapat saya serahkan kepada.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, pimpinan, jangan mundur dulu ini masalah *anu* biar penyesuaian.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Nggak bisa Pak ini udah ada SK, kita belum ada SK Pak.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Wah Pimpinan *nggak* tanggung jawab ini, melarikan diri.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Bener juga Pak Gandung, Pimpinan tanya *nih* sekarang udah nyampe mana katanya. Jadi saya bentar lagi, jadi Pak Nasir, Pak Buyung belum siap data, maksudnya ini menunggu giliran yang lain, saya tidak mengurangi hak Pak Nasir untuk bicara, kita persilakan dulu dari Fraksi Golkar, PKS, PAN dan PPP begitu ya Pak Nasir dengan sangat bijak saya, dia *nggak* bisa jawab data juga belum punya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya dia kan lagi siapkan datanya.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Sekarang bisa dijawab Pak Buyung? Kalau bisa dilanjut, kalau *nggak* bisa kita *hold* dulu pertanyaan Pak Nasir ini, yang lain masih nunggu ini nanti.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Dirut di-*hold* keluar, bukan saya.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Di-*hold* keluar?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Waduh.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kalau gini bagaimana dia bisa menjawab sebab pertanyaan saya *nggak* bisa dijawab.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Waduh ngeri juga ini Pimpinan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, tadi ada usulan panja, nanti di panja itu kita **...(suara tidak jelas 1.36.36).**

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya izin Pimpinan, *nah* saya mengusulkan karena ruwetnya *nih* birokrasi di Rokan ini maupun di Pertamina Hulu Energi ini. Kita bentuk panja saja.

KETUA RAPAT (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H./F-PDIP):

Nanti Pimpinan yang asli ngomong panja.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Jadi saya mengusulkan karena saya melihat penunjukan langsung yang dilakukan oleh prosedur perusahaan Pertamina ini, terutama Pertamina Hulu maupun Pertamina Rokan, maupun Pertamina Mahakam ataupun Pertamina anak perusahaan yang lain yang di bawah Pertamina Hulu Energi ini perlu dipertanyakan, apa masalah ditunjuk langsung.

Sementara dia menunjuk lagi perusahaan yang punya modal, yang punya kemampuan, yang punya teknologi untuk mengerjakan pekerjaan itu, kenapa *nggak* perusahaan yang asli itu saja yang memenangkan pekerjaan ini.

Nah ini kan berarti *ngemplang-ngemplang* keuntungan orang, ini kan namanya korupsi. *Kan* merenten panjang, rentengan panjang korupsi yang dilakukan oleh Pertamina ini. Ini ruang yang dibentuk, ini bahasa baru saja sinergi BUMN, ini apa? Ini kan korupsi yang dibangun di sini. Itu yang saya maksud *gitu loh*.

Saya minta kita bongkar ini sinergi BUMN ini, ada apa isinya? Sementara si pekerja ini mempunyai modal, mempunyai teknologi dan kemampuan ini memodali sendiri pekerjaan ini dan bukan dimodali oleh anak perusahaan BUMN ini. Ini orang yang *nggak* punya modal, cuma dijadikan anak perusahaan, ditunjuk, disuruh buat harga sendiri. Ini kajian mana yang dipakai, ini *kan* menjadi, menjadi temuan korupsi dan membuat rentengan panjang cuman bahasanya aja diubah *nih*, sinergi BUMN.

Setahu saya Keppres itu menyetujui cuman 200 juta bisa di PL, Bapak bilang "iya kami punya rumusan sendiri", rumusan yang seperti apa? Masa anak durhaka, Bapak kasih terus PL. Ini anak perusahaan kami, cucu perusahaan kami, ini durhaka tapi dikasih terus *gitu loh*. Masa kita udah melihat ini anak durhaka kita biarkan terus, negara dibiarkan rugi di situ.

Nah itu yang saya minta *gitu loh*, mana datanya dan saya minta melalui forum ini dibentuk Panja Rokan ini dan anak perusahaan lain yang dibawah Hulu Energi, termasuk Hulu Energi juga biar kita bedah ini, apa *sih* isi sebenarnya. Ada yang memindah-mindahkan jabatan, ada yang begini, ada yang titipan, ada yang pekerjaan dibayar tapi pipanya *nggak* dikerjakan dan nilainya cukup besar. Berapa lama saya nunggu datanya Pak jawaban ini, yang saya tanya tadi.

DIRUT PT PHR (JAFEE A.S):

Ini sudah ada datanya Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, berapa Pak?

DIRUT PT PHR (JAFEE A.S):

Jadi dari total.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

2022 ya.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Pak 2022 dari total 381 kontrak itu ada 45 kontrak yang dengan BUMN, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Berapa nilainya?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Kalau dari total nilai perusahaan Pak, dari 196 perusahaan yang bermitra dengan PHR ada 19 yang BUMN Pak, jadi kurang dari.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nggak tadi kan 300 sekian ada 40 sekian.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Itu yang ditunjuk, kan 300 sekian nilai kegiatannya, 40 itu apa Bapak bilang tadi.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Ada juga di-tender-kan Pak, tidak semua anak perusahaan itu kita tunjuk Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nah sekarang berapa Pak, jumlah nilainya itu?

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Sebentar kami lihat nilainya Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Yang 40 tadi.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Yang seperti PDSI, Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya minta datanya aja Pak semua kegiatan 2022 itu berapa yang Bapak lelangkan, nama, kita minta datanya itu, mana datanya dan itu yang saya minta waktu kita kunjungan reses pada waktu itu. Bapak bilang nanti kita susulkan, tapi sampai hari ini saya tidak terima data itu.

Mungkin itu aja Pimpinan, sambil nunggu mungkin bisa dilanjutkan dengan teman yang lain.

Terima kasih.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

Ya terima kasih, Pak Nasir.

Dilanjut ke PKS tadi belum ya, silakan Bu Diah.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi VII, Pak Dirut Pertamina Hulu Energi dan juga Pertamina Hulu Rokan dan seluruh jajarannya.

Memang yang menarik pertama Pak, saya sebetulnya kami mengapresiasi dari capaian ya dari PHE secara umum atas peningkatannya dan ini tentunya sebuah titik terang bahwa sesungguhnya kita bisa terus meningkatkan *lifting* Migas ini dan berharap target-target yang dicanangkan oleh pemerintah itu sendiri terkait dengan produksi Migas ini bisa tercapai, karena saat ini masih di bawah target Pak ya, performanya masih di bawah target dan kita dorong untuk apa namanya bisa meningkat.

Apresiasi ini sebagai bentuk apa namanya ya cara kita bersyukur Pak, mudah-mudahan dengan demikian semakin memudahkan kita untuk bisa memproduksi atau apa namanya menaikkan *lifting* migas ini.

Yang kedua kepada PHE ini, saya pernah membaca informasi Pak tentang temuan sumur Kembo Papua, Pak ya. Apakah ini benar informasi ini, lalu progresnya itu seperti apa, apakah memang sesuatu yang bisa ditindaklanjuti dan kalau memang menjadi sesuatu yang bisa ditindaklanjuti seperti apa *timeline* perencananya *gitu* ya karena tentunya kalau memang ini positif dan juga menambah produksi migas kita, ini berarti kan harus diperhatikan secara serius ya.

Yang kedua, saya memang jadi tertarik ya mencermati tadi diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Pak Nasir tadi. Pikiran saya berpikir bahwa kalau ini terjadi di Rokan bukan suatu hal yang tidak mungkin ini terjadi di tempat yang lain juga dan mungkin bukan hanya di PHE tapi di Pertamina secara keseluruhan karena kita sedang berbicara ini dengan Pertamina.

Jadi Pak Wiko ini saya juga menarik *gitu* ya, jangan sampai apa yang terjadi Rokan sebenarnya terjadi juga ini di perusahaan lainnya, tidak hanya di Rokan dan ini menurut saya sangat serius *gitu* ya, karena yang dirugikan adalah negara. Negara yang dirugikan memperpanjang mata rantai yang sebetulnya kemudian tidak esensi *gitu*.

Dan ini saya sepakat Pimpinan bahwa kita harus mendalami urusan ini secara lebih serius *gitu* ya, kita ini berusaha untuk mengurangi kerugian negara dan potensi korupsi itu tidak hanya pada sisi pengeluaran tetapi juga pada sisi *loss*-nya potensi pendapatan yaitu dengan panjangnya mata rantai yang tidak perlu *gitu* seperti itu.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

Iya terima kasih.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pimpinan, Fraksi Gerindra belum ya, daftar dulu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

Iya.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Golkar juga belum.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

PPP *nggak* ada ya, *oke* saya lihat di sini catatan memang Golkar dan Gerindra belum. Silakan Golkar dulu Pak, *oh* iya PAN dulu Pak Nasril. Pak Nasril, maaf Pak Nasril.

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Kalau puasa ini *kan* sering pelupa ya.

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII, teman-teman Anggota Komisi VII yang kami hormat.

Pak Dirut *Holding* Pak Wiko dan Pak Buyung sebagai Dirut PHR.

Suka tidak suka kita memang harus puas Pak Wiko terhadap capaian daripada *lifting* kita yang hari ini muncul di angka 595 untuk minyak ya, gas 10, gas kita 2.763 ya, Pak. Nah namun untuk penguasaan kebutuhan domestik kita *kan* baru gasnya 44% ya Pak, berarti masih ada yang impor.

Pengalaman kita dalam untuk melakukan eksploitasi saya pikir sudah cukup panjang ya, beberapa kendala-kendala tentunya juga cukup banyak ya. Banyak kendala yang sesungguhnya sering kita bicarakan di DPR ini *way out*-nya itu tidak ketemu atau lambat atau apakah ada kendala lagi dalam pencapaian *way out* itu Pak, solusi tadi. Katakan, bagaimana mencari investor yang benar-benar berinvestasi, bagaimana menanggulangi persoalan peralatan.

Nah ini *kan* sesungguhnya yang harus ya mendapat dukungan politik regulasi, dorongan dan regulasi dari DPR yang sesungguhnya ini belum, ini belum transparan atau belum terbuka, Pak. Ini yang saya berharap Pak Wiko yang hari ini sebagai pemangku kepentingan yang sangat luar biasa di *holding* ini.

Saya pikir harapan ini tidak boleh berjarang-jarang kita Pak, harus sering sekali supaya capaian, ini *kan* kita mengingat capaian 1 juta per *day* itu *kan* hanya mimpi, pada akhirnya *kan* bisa kita katakan mimpi, *nah* dorongan politik ini katakan begini Pak ya, apa yang dikatakan Saudara Nasir tadi, kita kecenderungan.

Kecenderungan ketika masuk badan usaha milik negara yang nyata-nyata tidak punya peralatan, yang nyata-nyata hanya menjual bendera, yang nyata-nyata hanya di-*retender*-kan kembali ataupun ditunjuk kembali kepada anak-anak perusahaan.

Nah ini apakah mengarah kepada profesional? Tidak, *nggak* profesional Pak. Dia ikut *bidding* apalagi ditunjuk, *nah* ini *kan* sesungguhnya kami melihat ya, kita sudah bahas ini, udah jauh kita bahas tentang keputusan menteri. Putusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 8/2017 itu ya sampai sekarang tidak muncul lagi kepmen, kepmen-nya *nggak* muncul lagi kenapa? Penuh dengan gugatan karena sinergi itu *kan* kecenderungan nepotisme. Nepotisme itu kecenderungannya ada *bla bla bla* di belakangnya.

Saya pikir Pak, harus ada ini Pak, harus ada me-reform kembali beberapa regulasi ketika ya persoalan mendasar kita adalah *lifting* ya,



anggaran kita cukup ya, Pertamina sudah siap ya, jangan ada lagi yang *mencla-mencle* di sini Pak. Ini yang persoalan sinergi, saya sangat mendukung Pak, sangat mendukung ya, terhadap di Komisi VII ini mendorong panja sinergi. Panja sinergi ini yang yang tidak hanya sebatas di PHR saja tapi di seluruh, di ini yang berkaitan tentang sinergi BUMN tadi.

Saya sepakat karena kecenderungan sinergi BUMN itu adalah nepotisme yang mengakibatkan tidak profesional, karena apa dilepas kepada di-*retender* kepada di bawah-bawahnya kembali. Itu yang saya menyikapi hal itu, kenapa ini harus saya sikapi? Karena sampai hari ini beberapa solusi terhadap *way out* yang keinginan bersama untuk mencapai 1 juta barel per day tadi ini *kan* didukung dengan Capex yang cukup ya Pak, betul ya Pak.

Nah ini hari ini kita tidak pernah membahas Capex, RKAP ini *nggak* pernah muncul di sini sehingga kita tonton aja, tiba-tiba kita melihat *oh* begini, ternyata hanya beberapa segelintir orang, maka Pak Nasil tadi, masih yang lama, masih yang lama. Artinya apa? dari zaman Londo sampai sekarang itu-itu juga.

Nah hari ini Bapak sebagai Dirut *Holding* yang baru kami memberikan dukung *support* Pak penuh, penuh kepada Pak Wiko sepanjang Pak Wiko bisa menerima pemikiran-pemikiran segar kita, pemikiran kita untuk kita jadikan ya karena kan kita ingin mengangkat Komisi VII, Pak.

Komisi VII ini terangkat bila kita bisa memicu, mendorong *lifting* 1 juta per day. *Nah* ini Komisi VII akan terangkat marwahnya Pak, termasuk Pak Wiko juga, ini prosesnya sangat luar biasa. Ini yang kita dorong, saya sepakat untuk panja sinergi tadi ini kita mau melihat ya, mau melihat sejauhmana yang ini, karena apa? Terkadang BUMN itu bukan BUMN juga yang mengatur, ada juga swasta yang mengatur, masa BUMN diatur swasta. Ada pihak-pihak swasta yang mengatur, dulu Pak Nasir mengatakan, ada namanya Jim.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan Jim, James. Izin interupsi, ini Pak Oto ini kenal dekat *nih* dengan James, *nggak*? Katanya Bapak perpanjangan James di sini, *nggak*, yang mengatur semua penempatan-penempatan di sini. Iya orang kayak *gini* juga harus disingkirkan *gitu loh*, itu yang saya dengar.

DIREKTUR SDM DAN PENUNJANG BISNIS PT PHE (OTO GURNITA):

Izin Pak Nasir yang saya hormati.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pak, Nanti Pak Oto, izin sama Pimpinan bukan sama Pak Nasir, Pak Dony Oekon yang ngatur lalu lintas rapat.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya izin interupsi, yang kami dengar perpanjangan James itu untuk mengatur regulasi Pertamina Hulu Energi ini apa, Bapak ini ditakutin sama seluruh regulasi yang ada di sini, mengotak-atik jabatan, mengotak-atik proyek, mengotak-atik permintaan James tadi, itu yang saya dengar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, agak menarik sedikit ini, ini James ini masuk salah satu dewan direksi?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Kita *nggak* tahu ini semacam halilintar apa *nggak* tahu kita ini.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Waduh, *nggak bener* ini.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

Sebentar, silakan Pak Nasril lanjut dulu.

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Halilintar apa, menyambar petiran ke sana, petir sana nyamber sini tapi dia yang menentukan, ketakutan semua yang di bawah sini. Apakah ada Pak Oto di situ saya *nggak* tahu juga, tetapi ini saya tinggalkan itu, Pak. Ada namanya James kan *gitu* yang bisa melakukan intervensi ke, artinya kuasa penuh yang kita berikan kepada Pak Wiko ini *nggak* berfungsi, Pak. Kami berikan dorongan Pak, dukungan politik, reguler yang Bapak butuhkan kami siap untuk memberikan itu. Kita *kan* mengejar 1 juta per day kan *gitu*, sepakat ya Pak.

Justru itu ya yang pertanyaan kedua tadi adalah suatu saat kami minta, *nggak* apa-apa *soft copy* juga *ndak* ada masalah Pak, sampaikan ke sekretariat ya tetap Capex 2023 dalam melakukan fungsi pengawasan Pak, gunanya.

Dan yang terakhir ya di samping kami memberikan apresiasi, kerja keras ya, tentunya rasa ketidakpuasan kita ya pasti ada Pak karena kita terlalu besar ruang-ruang yang menganga terhadap impornya, kan baru 68% kebutuhan kita.

Jadi dan yang terakhir kami memberikan apresiasi Bapak telah melepas Pak ini, Pak Chalid tadi ya tentunya ini sebagai bahan pelajaran bagi kita,

bagaimana kultur DPR itu, hierarki DPR itu ya, rasa kehormatan kita itu ya ini harus juga dipelajari kepada calon-calon ini Pak, calon-calon dirut, calon-calon ini supaya jangan semena-mena dengan posisi yang ada kan *gitu*, apalagi mempunyai kesewenangan yang semena-mena kan begitu Pak Ketua ya, *nggak* bisa semena-mena, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Nasril.

Saya lanjutkan langsung ya ke Fraksi Golkar, silakan Bang Lamhot.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan teman-teman Komisi VII yang saya hormati, Pak Wiko, Pak Oto, Pak Buyung dan segenap jajaran yang hadir pada hari ini.

Inilah gunanya interaksi antara Komisi VII dalam konteks menjalankan tugasnya pengawasan ya, bagaimana caranya *lifting* kita ini bisa naik paling tidak bisa mencapai target, walaupun tidak mencapai target tapi paling tidak mendekati 1 juta barel itu ya. Itulah yang selalu kita fokus membahasnya itu dan di rapat-rapat terdahulu juga kita selalu membahaskan bahwa fakta sekarang ini 70% hulu migas kita itu dikuasai oleh Pertamina.

Di satu sisi kita senang dan bangga karena ini nasionalisme kita ya, tapi di sisi lain juga dengan hengkang-nya pemain global ya, beralihnya transisi dari mereka-mereka yang pemain global itu terhadap Pertamina, di satu sisi memang kita bahagia tapi di sisi lain, dari sisi produksi juga sangat memprihatinkan kita.

Ini yang selalu dari hari ke hari selalu kita cermati dan kita cermati, ada apa ini? Kan itu yang menjadi problem di kita. Ternyata itu ada perubahan karakter korporasi yang ada ya, *nah* kita memang melihat belakangan ini Pak Wiko terus terang kita juga apresiasi naiknya produksi dari berbagai, baik di PHM maupun di PHR ya tapi catatan kita adalah masih jauh dari target yang kita capai.

Di tengah-tengah iklim ICP kita yang sangat dinamis harga minyak dunia yang sangat dinamis, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan APBN kita dengan naiknya ICP itu adalah bagaimana menaikkan produksi di hulu, *lifting* kita. Itu yang menjadi *concern* kita di Komisi VII.

Kita sangat miris Pak, adanya perubahan karakter-karakter yang ada dan ini membebani terhadap produksi yang ada di hulu migas kita, ini



membebani kita semua. Di rapat terdahulu ya ini Pak Nasir menyebut tadi James, saya *nggak ngeh* Pak sebenarnya, *nggak ngeh* Pak Nasir. Lalu saya *tracking* ternyata *kok enggak* ada nama James, yang ada nama Febri Prasetya Adi Suparta dan juga masih tersangkut kasus KPK, kasus Rudi dan Dini.

Ini udah rumus *nih* Pak Wiko, kita ini Komisi VII ini hari-hari ini kan membicarakan bagaimana kita menaikkan *lifting* hulu migas kita. Tetapi kemudian tadi Pak Nasir sudah mengatakan ada satu orang yang sangat berperan strategis di luar Pertamina yang mengatur segala sesuatunya.

Menurut saya ini *nggak*, ini yang justru menjadi beban, orang ini yang menjadi beban. Adanya perubahan karakter di Pertamina yang tadinya dikelola oleh PMA, pemain-pemain global transisi ke Pertamina masuklah kawan ini, obrak-abrik mengatur GM-GM, mengatur para direksi dan lain sebagainya. Terus terang Pak Wiko ini sangat membahayakan Pertamina, ini sangat membahayakan untuk mencapai tujuan kita target kita 1 juta barel per day orang ini.

Nah oleh karena itu Pimpinan, saran saya, saya ingin menyarankan kita rekomendasikan supaya Pertamina ini tidak terpengaruh oleh intervensi tadi yang nama disebut itu ya. Kalau perlu ya yang bersangkutan aja jadi dirut, si James itu saja jadi dirut biar sekalian, dia yang mengatur proyek, dia ngatur GM ya.

Kalau tadi Pak Nasril mengatakan harus dipanggil ke Kertanegara 68 lah, apa hubungannya? Jangan-jangan ini yang menjadikan dipanggil Komisi VII *nggak* mau, dipanggil oleh yang bersangkutan mau, *kan* ini *kan* sebuah ketidakdisiplinan yang mengakibatkan produksi daripada kita itu *nggak* mencapai target. Ini yang menjadi problem kita hari ini.

Maka saya Pimpinan merekomendasikan untuk tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar manapun yang mengatur jabatan-jabatan struktural dan pengaturan-pengaturan proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energi, kalau perlu kita rekomendasikan supaya orang ini tidak lagi menjadi hambatan ataupun tidak menjadi beban ya ketika kita ingin mencapai target kita 1 barel per day, ini yang jadi utama dan jangan menjadi sebuah preseden apa yang sudah dilakukan oleh tadi Dirut Mahakam, kita *nggak* mau itu menjadi sebuah preseden ya, cukuplah itu yang terakhir, Pak Buyung dan Pak Oto dan juga di lingkungan hulu migas kita ya.

Jangan sampai kalian-kalian lebih mendengarkan yang namanya James daripada mendengarkan Komisi VII, kita semua di sini sudah berbasa-busa membahas dari waktu ke waktu, bahkan kita harus kunspek ke lapangan, mengecek dan lain sebagainya, tapi kita pun *nggak* dihargai. Orang yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya terhadap ini, justru itu yang paling ditakuti oleh mereka-mereka.

Nah oleh karena itu kita rekomendasikan Pimpinan, supaya tidak ada intervensi pihak luar yang bisa mengatur-ngatur semuanya ini, saran saya seperti itu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Bang Lamhot.

Masih ada lagi.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Gerindra.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./WAKIL KETUA RAPAT KOMISI VII DPR RI):

Maksud saya begini, tadi kan kita batas waktu jam 4, kalau mau kita lanjut kita perpanjang dulu atau kalau mau kita skor Ishoma, kita Ishoma dulu nanti kita lanjut lagi *gitu*, ini lebih 10 menit dari waktu yang kita sepakati.

Ya, ya. Saya perpanjang waktunya dulu, saya perpanjang waktu dulu sampai 16.45 WIB setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Silakan Pak Ramson dulu, setelah ini baru Pak Gandung.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Saya langsung aja ini ke Pertamina Hulu Energi, ini yang tadi yang keluar itu cucunya Pertamina Hulu ya PHE ya Pak, ini interaktif, cucunya ya.

DIRUT PHE:

Betul Pak, anak usahanya PHE.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Struktur ini saya lihat tidak ada, yang ada hanya PHE, PH Mahakamnya *nggak* ada, jadi itu cucu ya.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Betul Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terus memang ini Pertamina PHE ini sangat besar, saya interaktif aja. Saya mau tanya ini keuntungan PHE itu 2022 berapa Pak?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Revenue kita 16 milion Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

16 miliar US dolar atau triliun?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Miliar dolar, Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

16 miliar US dolar, itu keuntungan atau pendapatan?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Pendapatan, Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pendapatan, ya jangan dikasih tahu pendapatan dong, *cost*-nya besar mungkin bisa-bisa *cost*-nya juga 15,5 miliar US dolar.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Laba bersihnya belum *closing* Pak, namun

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Yang tidak audit berapa?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

4,6 Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

4,6 miliar US dolar karena memang ini sumber pendapatan terbesar dari Pertamina. Terus yang saya mau tanya itu ada saya baca di berita koran nilai mau IPO, nilai PHE itu dinilai Rp9 triliun *bener* ya Pak.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Tidak benar.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tidak benar ya, *kok* bisa terekspos begitu 9 triliun.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Kami kurang tahu, Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Oke, terus yang berikutnya target ini kan Meneg BUMN sudah berbicara soal IPO PHE, ini targetnya berapa triliun mau diperoleh dari IPO PHE?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Kalau sesuai aturan OJK minimum 10% Pak dari evaluasi.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kira-kira berapa triliun katanya 15%, targetnya berapa triliun dapat dana segar.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

1,5 bilion Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

US dolar?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Miliar US dolar

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

1,5 miliar US dolar, terima kasih.



Pak Dirut, Pak Ketua, Pak Pimpinan ini sebenarnya problem bangsa ini, menghasilkan keuntungan 4,6 miliar US dolar tapi harus diprivatisasi untuk mendapatkan uang 1,5 miliar US dolar. Saya kadang-kadang *nggak* ngerti logikanya, jadi ini mau dijual, mau dijual, semua privatisasi dari dulu.

Ya sebelum reformasi masih hampir tipis yang diprivatisasi, ini semua sudah diprivatisasi padahal andalan kita adalah Pertamina. *Nah* ini hanya dapat 1,5 miliar US dolar itu nanti jadi termasuk milik publik dan biasanya investor dari luar yang banyak masuk. Padahal keuntungannya di sini 4,6 miliar US dolar, kalau tadi pendapatannya 16 miliar US dolar, kadang-kadang saya *nggak* ngerti logikanya mereka kenapa membuat keputusan seperti itu.

Itu kadang-kadang berpikir apa aja kerjanya, jadi hanya begitu padahal CSR diurus-urus ya kan oleh Meneg makanya saya heran juga, ini mau dijual, mau di-IPO. Ini memang suatu problem ini makanya perlu Pansus Pertamina ini, Pansus Pertamina perlu, panja, panja iya, panja.

Ini harus kita bedah ini, ini *kok* begini-begini aja ini padahal Pertamina ini Pak Ketua 68% *lifting* minyak itu Pertamina tapi harus dijual coba, harus di-IPO hanya untuk mendapatkan dana 1,5 miliar US dolar, keuntungannya 4,6 miliar US dolar 1 tahun coba.

Ini saya kadang-kadang saya mengerti Pak soal-soal *finance* Pak, cukup paham saya. Dulu saya juga pernah pemain di *stock exchange* juga dulu, 10-15 tahun yang lalu. Jadi saya tahu, ya cuma ini kan gimana coba ini, masa mau dijual 1,5 miliar US dolar keuntungannya 4,6 miliar US dolar.

Ini perlu apa namanya *re-thinking* kalau kata Bung Karno "*re-thinking*", ada introspeksi, re-trospeksi, *re-thinking* sama *re-setting* perubahan strategi. Jadi jangan kalau poinnya tidak jelas ngapain harus diprivatisasi.

Terus yang ketiga, ini sekarang kan era *green energy*, ini saya interaktif lagi. Ini CCS atau *Carbon Capture Storage* yang digunakan oleh apa namanya Pertamina PHE dan semua anak perusahaan dan cucu perusahaannya udah berapa banyak Pak?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Untuk *storage* kami masih dalam tahap *study*.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

CCS (*Carbon Capture Storage*).

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Iya, masih dalam tahap *study*.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Belum ada yang dipasang ya karena ini trennya harus dipasang karena kita menuju *green energy*, apalagi menuju tahun 2060 mengenai *Carbon Capture Storage*. Kebetulan Pak Ketua, saya tahu-tahu juga sedikit mengenai CCS ini, mengenai teknologinya. Jadi itu yang perlu disiapkan juga strateginya untuk itu, sehingga apa namanya kalau investor, dalam arti investor masuk tidak harus untuk dijual.

Nah ini harus dibuat suatu strateginya, bagaimana agar Pertamina itu bisa mendatangkan investor tapi tidak harus menjual kepemilikan, kepemilikan. Kalau ini kan EPO yang dijual kepemilikannya, jadi tidak 100% lagi milik rakyat atau milik negara. Itu yang perlu perhatian yang mendalam, kalau soal yang lain, lebih yang lain nanti bisa lebih banyak lagi waktunya, tapi seperti tadi mungkin ada usulannya Pak Gandung tadi panja ya itu kalau mau mendalami lebih dalam memang begitu.

Jadi itu memang yang, cuman saya sangat prihatin seharusnya harus strategi yang jelas untuk semua *sub-holding-sub-holding*-nya Pertamina karena ini kan Pertamina sudah sangat besar. Ini luar biasa tapi kalau ambil keputusannya harus di atas lagi, dikatakan A langsung A semua, memang menjadi problem juga yang akan dihadapi oleh Pertamina.

Kalau Pertamina masih tetap 100% milik negara milik rakyat itu suatu kebanggaan bagi Indonesia, ini perlu untuk Pak Ketua, tinggal Pertamina yang apa namanya, masih 100% milik negara.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Ramson.

Nah kita lanjut tadi saya janji Pak Gandung, silakan Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Dari awal sudah ada kekecewaan sebenarnya ini, tapi sudah diobati untuk suruh keluar. Tapi pada Rokan saya lebih kecewa lagi ini, Pak Dirutnya sama sekali tidak menguasai data. Data sedikit-sedikit nengok ke belakang, tanya, ini tanya. Ini berarti Pimpinan yang tidak mampu menguasai data,

kemungkinan ini kalau sekarang istilah oligarki kalau dalam dulu kroni-kroninya ini, ini bahaya Pak *sampean* itu, Pemimpin harus menguasai data betul.

Untuk itu saya minta agar data yang diminta Komisi VII Pak Nasir tadi betul-betul diberikan, kalau sudah 1 kali, 2 kali diminta, kemudian banyak alasan ini mesti ada masalah di situ, mesti ada masalah. Pertamina perusahaan-perusahaan yang menumpang hidup dan kehidupan bangsa, negara, rakyat tapi kalau cara mengolahnya tidak profesional itu *panjenengan* pengkhianat bangsa karena mengolah sumber daya kekayaan ini semau-maunya aja.

Lebih ironis lagi kalau memang betul Mister James Bond tapi bukan Pak, temen kita, Mr. James tadi itu nama panggilan itu betul-betul menggurita di *panjenengan* Pak. Maka dari itu tidak ada kata lain kita bentuk panja dan Bapak Pimpinan, kemarin panja kemarin saya menerima usulan panja, saya terima tapi kalau sekarang *nggak* saya terima, harus keputusan RDP ini panja, khususnya Rokan ini daripada itu aja kelihatannya gamblang tapi setelah masuk ke lebih kecil ruwet ini juga tanggung jawab *panjenengan* Pak ini.

Maka dari itu saya sekali lagi minta ini panja penting, ini tidak sekedar keinginan panja itu tapi kebutuhan dalam rangka untuk menyehatkan Pertamina, dalam rangka untuk menyehatkan Pertamina itu *wis ngedi-ngedi panjenengan* yang berkaitan keamanan itu, seperti itu masuk kilang *kobong* terbakar, *nah* ini kan *celaka ning ciloko coro jawane* itu, *celaka ning ciloko* karena banyak tadi, banyak hal yang ruwet-ruwet tadi ini.

Ini Pak, *panjenengan kok ketok 'e lemot* dalam data ini apa Pak, sebenarnya top manajerial itukan biarpun secara pokok detailnya itu nanti staf tapi kan harus tahu pokok-pokoknya, ini mengurangi *performance panjenengan* dalam memimpin perusahaan yang besar ini, Pak.

Ini tidak *fine-fine* jabatan *sampean* itu, ini menyangkut masalah Gusti Allah menyangkut uang rakyat Indonesia. Kami usulkan Pak, sekali lagi kita buat panja secara cepat sebab gerakan orang menggurita itu lebih cepat daripada gerakan-gerakan formalitas formal kita.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya terima kasih Pak Gandung.

Terakhir, Bu Mercy dulu sebentar, boleh? Bu Mercy silakan, Bu Mercy. Setelah itu baru Pak Gunhar.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, terima kasih Pak Ketua.



Bapak-Ibu Anggota yang saya hormati dan seluruh jajaran dari PHE, PHR dan semua jajaran yang ada di sini.

Ini saya langsung aja agak teknis *sih* sebenarnya tapi ini ada menggigit *sih* dari tadi lihat data-datanya. Mungkin kita bisa buka di halaman 5, kalau bisa mungkin saya dikasih sedikit penjelasan kalau bisa juga interaktif ya. Halaman, *sorry* halaman 6, *nah* di halaman 6 itu ada target rencana kerja 2023.

Ini saya *me-review* balik aja pada saat rapat Banggar kita kemarin sebenarnya kan agak tarik-tarikan ya antara *lifting* yang turun, sementara *cost recovery* yang naik terus-menerus. Artinya kalau *lifting* turun, *cost recovery* tetap atau naik ini kan sebenarnya anomali sesungguhnya.

Tetapi kemarin kita memberikan justifikasi terhadap kerja-kerja AOR, kemudian *proven reserve*, cadangan dan sebagainya. Sehingga dari yang informal sampai masuk di dalam rapat Pak Ketua.

Nah ditarget kinerja 2023 dari regional 1 sampai dengan regional 5 di sini saya tidak lihat yang *development wells* dan *exploration wells* ya, saya ingin tanya aja yang *work over* 268, kemudian ada 8, ada 337, 55 dan 20 *work over* di situ penutupan sumur atau pemeliharaan, atau AOR atau apa bentuknya karena ini sudah pasti akan sangat berdampak juga terhadap kepentingan *lifting* kita yang ditetapkan kemarin udah turun sebenarnya.

Waktu penetapannya itu saya tahan hati rasanya itu sedih banget karena kita *tuh* mewakili Komisi VII ya, *performance* dan kualitas kerja kita itu sebenarnya ada di sana pada saat itu, mulai dari rapat di Komisi VII sampai di Badan Anggaran.

Saya minta interaktif aja kalau bisa ada yang menjawab, *ntah* dari PHE atau dari PHE aja langsung ya.

Silakan Pak.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik Ibu, terima kasih.

Yang dimaksud dengan *development wells* ini adalah pemboran sumur pengembangan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

No, no yang saya tanyakan *work over*-nya, Pak.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Untuk *work over* itu kita mengerjakan di sumur *existing*, namun kita melakukan pindah lapisan berdasarkan data-data terbaru yang kita miliki. Setiap tahun kan kita melakukan pemboran baru, melakukan *work over*, dari

situ kita dapat mengetahui dimana sebetulnya masih ada jebakan-jebakan minyak. Jadi di sumur yang sama kita pindah lapisan, pekerjaannya adalah.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Itu maksudnya AOR ya, Pak.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Bukan Bu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Bukan AOR lagi ya, jadi ini berpindah lapisan ke lapisan yang lain lagi gitu ya. Maksudnya supaya kita *clear* aja *gitu loh*, untuk *work over* yang 268, 337, 5520 dan 8 di sini kan ada, di sini ada 5 region ya. Saya ingin tanya aja dari *work over* sebanyak ini berapa kira-kira yang bisa kita peroleh Pak untuk meningkatkan *lifting*.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Angkanya menjadi satu dengan *development wells* itu ada 91.000 barel oil per day Bu total, untuk lebih detail saya harus melihat ke lampiran Bu, sebentar.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jadi ini antara *development wells* dengan *work over* itu 1 sumur yang sama atau berbeda Pak?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Berbeda Bu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Berbeda, maksudnya ini supaya mungkin bisa ada penjelasan.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Kalau dari target di 2023 *work over* itu hanya ditargetkan 930 barel oil per day, WIWS (*Well Intervention* dan *Well Service*) ada 9.800. *Sorry* terbalik Bu, *work over* itu ditargetkan 7.700, WIWS 41.000, sementara dari bor 36.000 barel oil per day Bu. Total 90 yang saya sebutkan di halaman 5 tersebut.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Sekarang kita lihat di halaman apa namanya halaman 4, di halaman 4 di sini Pertamina mengelola produksi migas sebesar 1,5, yang berada di dalam

negeri maupun internasional, status sampai dengan Maret 2023 produksi minyak sebesar 424 dan nasional dari realisasi nasional 621 dan produksi gas 24-29 mmcsd dan realisasi nasional, sekian.

Mungkin bisa butuh penjelasan Pak dari karena di sinikan dijelaskan inikan secara umum aja ya bahwa Pertamina mengelola produksi migas 1,5 juta BOEPD dari 65 blok migas. Kita ingin mendapat kepastian aja Pak, kira-kira ada potensi naik *nggak* dari apa yang kita tetapkan di Badan Anggaran dari sisi Pertamina sendiri, berapa kira-kira yang bisa disumbangkan untuk ikut.

Kemarin itu kan sebenarnya penetapan, penetapan *lifting* itu sebenarnya penetapan *lifting* sangat konservatif, amat sangat-sangat konservatif dengan mempertimbangkan seluruh variabel. Dengan catatan, dengan catatan waktu itu kita diskusi informal waktu itu dengan Pak Ketua Banggar, kalau *cost recovery*-nya tetap di 8,25 mestinya ada peningkatan dan itu tanggung jawab Komisi VII untuk meningkatkan itu.

Jadi sebelum kita minta dari perusahaan-perusahaan K3S yang lain, dari Pertamina sendiri gimana *gitu loh*, jadi ini yang kita ingin dengar.

Terima kasih, silakan mungkin interaktif sebentar ya.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik, untuk 2023 target kita diproduksi minyak itu 5% lebih tinggi dari realisasi di 2022. Jadi target kita *full years* akan 595.000 Bu, per hari ini 3 bulan pertama kita sudah memproduksi 575.000 barel oil per day. Kalau kita plot *year to date* target di tahun berjalan, di bulan berjalan dengan realisasi bulan berjalan kita 2% di atas target.

Sebagai gambaran ini merupakan produksi kita tertinggi dibanding kita pada awal tahun lalu yang baru 2022 yang terus menurun sampai September, September kita berada di angka yang rendah 406.000 barel per day untuk di domestik Bu ya, hari ini kita sudah di 425.000 barel oil per day. Artinya dari domestik kita ada kenaikan 20.000 barel oil per day.

Secara potensi kita melihatnya ada tergantung kita bagaimana mengelolanya ini secara *best engineering oil practices*, termasuk bukan hanya kegiatan untuk pemboran, *work over*, *well service* tapi juga bagaimana mengelola *integrity* Bu, *integrity*.

Hari ini dari banyaknya blok kita rata-rata yang sudah, peralatan yang sudah umur di atas 40 tahun itu sudah banyak Bu di Rokan, di Oses kemudian di Pertamina EP. Jadi kita juga berkutat dengan *asset integrity management* Bu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, terima kasih Bu Mercy, Pak Wiko terima kasih jawabannya.



Terakhir Pak Gunhar, silahkan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Dirut PHE, Pak Dirut PHR juga Pak Direksi Hulu Energi, kawan-kawan Komisi VII yang saya hormati.

Tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan di RDP ini terkait dengan produksi minyak kita yang juga belum bisa mencapai atau menyamai apa yang diproduksi oleh Chevron pada masa itu, kalau tidak salah tahun 2018. Tetapi kita mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Rokan yang sudah semakin meningkat produksinya, itu yang poin pertama Pak.

Poin yang kedua, saya ingin menanyakan terkait dengan *accident fatality*, bagaimana *sih* regulasinya baik itu kepada pejabat yang memegang jabatan atau kepada pihak kontraktor yang melaksanakan pekerjaan.

Dan yang ketiga, tadi yang disampaikan oleh Pak Nasir ada istilah yang Pak Buyung sampaikan sinergitas. Kita melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan bukan hanya di sektor hulu, tetapi di sektor pembangunan infrastruktur pun banyak BUMN yang dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan strategis nasional, seperti pembangunan jalan tol, waduk ya.

Dan ini saya juga tidak, saya pikir tidak menyalahi aturan yang ada, tetapi dalam sektor yang sangat strategis seperti eksploitasi dan eksplorasi sebetulnya kita ini mampu Pak Dirut ya, kita ini mampu tetapi kenapa kita berikan kepada ruang pihak lain seperti perusahaan-perusahaan asing yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi itu.

Dan kita juga tahu ya seperti yang tadi disampaikan sebelumnya perusahaan-perusahaan ini sebetulnya memang tidak layak yang kawan-kawan sampaikan tadi untuk mendapatkan pekerjaan itu, tetapi mungkin tadi disampaikan kawan tadi kan ada orang-orang tertentu yang bisa mengatur *invisible hand* kata orang, yang bisa mengatur bahwa pekerjaan ini dikasihkan kepada perusahaan ini.

Saya agak sedikit tertarik apa yang disampaikan teman kita baik itu Bang Nasril, Bang Lamhot, juga maupun Bang Nasir terkait dengan nama seseorang. Ini forum resmi ya Pimpinan ya, dalam RDP ini menyebut nama seseorang yang seseorang itu tidak memiliki kuasa apapun, amanah apapun sesuai dengan konstitusi bisa mengatur seluruh pekerjaan yang ada di Pertamina. *Nah* ini gawat negara ini kalau sudah begini, ini negara mafia namanya iya kan, *nggak bener* ini. Apalagi orang tersebut masih terkait dengan kasus hukum iya kan.



Jadi saya minta kepada Pimpinan yang terhormat pada forum RDP ini kita istirahat sesuai dengan keputusan kita tadi, kita skor 15 menit ya sebelum itu kita masuk kepada tahap proses untuk pembahasan panja terkait dengan apa yang sudah kita bahas dalam forum rapat ini.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan Pak Hendrik.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang terhormat, teman-teman di Komisi VII, Pak Wiko beserta tim Pertamina Hulu.

Saya melihat data ini Pak kinerja SH *upstream*, saya melihat di sini ada kontribusi nasional produksi untuk Indonesia ya 60%, oil 44% gas gitu Pak ya. Memang kita sangat konsentrasi dengan minyak ya, gasnya kelihatannya kita tidak fokus. Boleh lah dijelaskan Pak Wiko sumur-sumur gas kita di mana aja Pak, kita sibuk dengan minyak, gasnya tidak kita perhatikan padahal gas ini juga penting buat kita.

Tolong dijelaskan Pak Wiko smur-sumur gas kita di mana aja, terus apakah sudah optimal dan juga bagaimana serapan gas ini pada masyarakat atau siapapun istilahnya *gitu*. Apakah memang yang 44% ini sudah *full* begitu, kira-kira itu aja Pak Wiko.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya, terima kasih Pak.

Saya pikir ini udah semua ya Pak, cukup ya. Pak Wiko saya silakan untuk ini pertanyaan dari tadi sudah cukup banyak dan sebagian sudah interaktif dengan Pak Wiko. Izin poinnya silakan dijawab, selebihnya kita akan apa namanya boleh tertulis, dijawab dengan tertulis tapi yang paling mendasar adalah nanti kita akan mendetail kalau sampai masuk di dalam panja nanti.

Yang detail nanti kita akan masuk di dalam panja nanti, memang nanti kita akan bahas di internal proses pembentukan panjangnya. Tapi poinnya sekarang, jadi apa poin-poin yang utama dulu dijawab silakan, nanti sisanya secara tertulis, untuk secara detailnya nanti kita akan jawab secara di dalam panja nanti, kita akan bicara lebih luas, karena jujur.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Karena jujur *sorry*, karena jujur ini kita dari kemarin kan dari periode, bukan periode baru ini dan dari 2 tahun yang lalu ini kan kita menggembar-gembor *lifting* mau naik 1 juta ya. Itu target *lifting* 1 juta barel, yang kurang itu perkataan itu apa? Target satu juta ekonomis.

Karena kalau sekarang lihat dari *reserve* yang ada menurut saya mungkin satu juta, tapi ekonomis tidak? *Nah* ini yang tidak yang belum terjawab sebetulnya. Kalau kita mengatakan hanya satu juta saja dengan *reserve* yang kita punya sekarang, *oke* setuju saya, tapi apakah itu kalau kita bor, kita *drilling*, kita angkat itu menjadi ekonomis? Itu yang jadi pertanyaan kedua. *Nah* ini harus didalamin nantinya, Pak.

Silakan Pak Mukhtar.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan, panjangnya ini kan kita bukan hanya Rokan tapi panja secara menyeluruh dari kinerja hulu. Jadi supaya kena semua bukan hanya Rokan, tapi juga PHM juga perlu, yang lain-lain juga.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya saya lebih kepada *holding* di atas yaitu kepada hulu energinya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sedikit Pimpinan, Pak Dirut data tadi udah ada ya.

DIRUT PT PHR (JAFFEE A.S):

Iya Pak, udah Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Mana ya.



DIRUT PT PHR (JAFEE A.S):

Ini bisa kami sebutkan Pak?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nggak di print aja.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, nanti datanya diserahkan ke kami karena kami akan mendalami nanti di dalam panja ya, nanti datanya tolong di-print dan diserahkan kepada kami.

Pak Wiko silakan untuk menjawab.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Izinkan saya menjawab poin-poinnya, yang pertama yang banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian mengenai masalah *safety*. Memang ini menjadi komitmen kita sebetulnya untuk melakukan yang disebut dengan *zero accident* dan kita secara kronologis Pertamina sebetulnya sudah memiliki sistem yang bernama Supreme.*

*Namun demikian betul adanya di awal-awal tahun ini terjadi beberapa *accident* yang menyebabkan *fatality* Pak. Ini terjadi karena di 2023 kita bekerja lebih banyak lagi, bekerja lebih besar lagi dan banyak peralatan yang tadinya atau *supporting system* yang tadinya masih *cold step* tidak siap pakai, kemudian kita apa, kita lakukan *procurement* setelah didahului inspeksi dan nyatanya memang masih ada kejadian-kejadian *fatality* di lingkungan Pertamina Hulu Energi.*

*Langkah kami untuk memperbaiki ini di Pertamina Hulu Energi sejak bulan lalu kita sudah mencanangkan apa yang kita sebut dengan *safety transformation* Pak, ini akan menyangkut masalah CLSR. CLSR itu adalah *Corporate Life Safeting Rule* yang ada di tempat kita ada 15, ini menegakkan lagi aturan mana yang *do* dan mana yang *don't*, mana yang boleh dan mana yang tidak.*

*Kemudian yang kedua kita perbaikan *culture* Pak, *culture* untuk *safety* supaya *safety* ini menjadi *in mind*, ada di kepala kita terus dan kita perkuat di situ dengan yang namanya *stop walk authority*. Jadi di mana kalau seseorang melihat sesuatu kondisi berbahaya, maka dia bisa melakukan *stopin*.*

*Yang ketiga kita fokus di masalah kontraktual, ini kita bedah mulai dari *requirement* administratif sampai inspeksi peralatan kita lakukan dengan baik. Dan yang terakhir akan ada penegakan yang kita sebut dengan *reward and**

punishment, tentunya dengan telah memberikan pemahaman dan pelatihan ataupun peningkatan *knowledge* bagi para pekerja maupun *supporting system* kita. Setelah itu kita lakukan masih terjadi kelalaian, maka kita akan melakukan *punishment*, itu yang di bidang *safety*.

Kemudian pertanyaan tentang gas ada 2 Pak, di Jambaran Tiung Biru dan sumur gas. Jadi secara keseluruhan hampir di semua regional kita ada produksi gas Pak, ada sumur gas, di Sumatera ada 700 mmscfd, di Jawa Barat sekitar 270, Jawa Timur 200 mm, di Kalimantan Timur ada 600, 580 dan di Sulawesi ini telah mencerminkan kondisi *demand* di domestic, Pak.

Walaupun sebetulnya potensinya bisa lebih kita berproduksi seperti di Sulawesi masih ada potensi yang perlu kita monetisasi, kemudian di mana di Kalimantan Utara masih ada juga yang belum termonetisasi. Khusus untuk di Jambaran Tiung Biru yang terjual baru 172 mmscfd, pembelinya adalah PGN. Kita produksi kita mampu sampai 192 mmscfd, 20 lagi kita akan bekerja sama dengan kementerian pemerintah ke mana gas ini akan diberikan alokasinya. Itu tentang gas.

Kemudian Kembo tadi ya Bu, dan beberapa pertanyaan tadi terkait eksplorasi, Kembo ini adalah temuan eksplorasi Bu, ini dapat kami infokan ini tidak bisa langsung serta merta dimanfaatkan, kita harus *appraisal* dulu seberapa besar *reserve* yang ada, kemudian karena ini juga menyangkut gas kita harus mencari *demand* gasnya dulu Bu. Kita perkirakan di Papua ini mungkin 2-3 tahun kemudian baru bisa komersial di wilayah Kembo.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Itu wilayah mana Pak?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Papua, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin Pimpinan, itu yang dirutnya mana, ada?

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Nggak ada Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Oh iya nanti dirutnya Bapak bawa hadirkan di sini, jadi biar dia juga bisa kita pertanyakan untuk pengembangan apa-apa saja yang dilakukan *gitu*, harusnya Bapak bawakan semua dirutnya jadi kita kenal.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Siap, kemudian mengenai sinergi ini memang ada aturan internal kita untuk sinergi antar anak usaha SK 38. Prinsipnya adalah memberdayakan anak-anak usaha untuk pekerjaan internal, konteksnya memang harus kompetitif, harus berdasarkan dengan *expertis* juga.

Didalam anak usaha kita untuk yang kontrak *long term*, anak-anak usaha kita telah memiliki *resources* sendiri seperti PDSI itu memiliki rig pengeboran sendiri dan *work over rig* sendiri. Sementara untuk yang kontrak *short term*, PC dan lain-lain kebanyakan anak usaha kita melakukan kemitraan dengan penyediaan sub kontrak lainnya Pak. Itu untuk yang sinergi penjelasan awal.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, minta konfirmasi tadi kan dicontohkan oleh Pak Buyung tadi Pak ya pengeboran ya Pak Buyung PT Inti. PT Inti itu kan bukan anak perusahaan.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

PDSI Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Oh bukan PT Inti, PDSI *nah* berarti ini memperdayakan internal. *Nah* saya ini begini Pak, saya paling tidak setuju tadi judulnya itulah sinergi adalah pendekatannya adalah nepotisme. Nepotisme itu pendekatannya tidak profesional, boleh *deh* Bapak kaji sesuai dengan apa, kenapa tidak ada *fairplay* di sini, tidak ada *fairplay* dan juga tidak ada ini, tidak ada kompetitif, orang *bidding* kenapa ditunjuk *gitu loh* Pak.

Maka saya setuju apa yang disampaikan teman-teman mau masuk ke lingkaran panja kita kaji nanti *gitu*, baik sinergi BUMN maupun sinergi yang ada di internal, sama persis.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan dilanjut Pak Wiko.

DIRUT PT PHE (WIKO MIGANTORO):

Baik, terima kasih masukannya, Pak.

Khusus PDSI pangsa pasarnya hanya 30% Pak dari rig yang kita sewa sebelumnya ada dari swasta, itu mencerminkan jumlah rig yang dia miliki Pak,

harganya juga cukup kompetitif dibanding dengan yang lain. Namun kami mengikuti proses selanjutnya untuk bisa di detail Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, silakan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini saya mau tanya sedikit Pak Wiko, ini kayanya Dirut Mahakam ini diubah jadi Dirut Rokan ya, apa benar ya, yang bandel tadi.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Kami sudah ada surat dari pemegang saham untuk melakukan rotasi.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus orang kayak *gitu* ditunjuk.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, ini udah di luar konteks mungkin kita bisa lanjut ke.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ndak bukan begitu, sebentar Pimpinan, kita kan belum selesai.

Nah ini kalau orang yang kayak *gini* dijadikan dirut lagi apalagi di dapil saya, *wah* pusing kalau saya lihat orang kayak *gini*. Tolong Pak ini dijadikan perhitungan, yang tadi yang keluar tadi jadi dirut di Rokan katanya.

Ini Pak Wiko aja ini masih punya kasus pipa, tapi bisa jadi dirut, saya *nggak* ngerti juga ini. Ini yang satu kaki tangannya James tadi ya ini, yang Direktur SDM ini. Ini udah melinting ini sebenarnya di situ sudah.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya nanti kita dalamin, Pimpinan nanti kita dalamin di panja, Pimpinan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan, belum selesai ini Pak Gunhar. Pak Gunhar ini kayaknya ada yang *nggak* beres saya lihat *gitu*, saya kan masih ngomong Pak. Jadi saya

minta pimpinannya jadi catatan juga di kesimpulan bahwa orang yang tadi tidak bisa menghargai Komisi VII aja didatengin di tempat kerjanya, kami dari Komisi VII minta semua yang direkomendasi oleh Kementerian BUMN itu dibatalkan, *nah* itu, bukan RUPS. Negara inikan harus dipimpin oleh orang yang *bener gitu loh gitu dong*.

Itu Pimpinan, terima kasih.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, saya sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini sebentar Pak Gandung, ini kita bahas di dalam panja, lebih dalam lagi di dalam panja. Saya dari tadi banyak masukan-masukan ini memang banyak intrik-intrik yang terjadi didalam sini. Jadi makanya *nggak* ada salah kita panja, kita buka aja di panja seada-adanya, *nggak* ada masalah menurut saya.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Tadi Pimpinan diberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tentu Pimpinan nanti bisa *...(suara tidak jelas 2.41.20)...* dengan Pak Wiko tentang hal-ikhwal apa yang kita sampaikan tadi itu dan Pimpinan, Pak Sugeng siap untuk itu, nanti kita lihat hasilnya. Jadi rekomendasi ini mirip rekomendasi anggota itu semua tidak ada yang menentang, kalau Pimpinan *leta lete* justru Pimpinan nanti yang kita panjakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Siap, terima kasih.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Sedikit Pimpinan, Pak Wiko apa yang digarisdibawahi oleh Saudara Nasir terhadap Saudara Chalid tadi yang dimutasi, atau dirotasi, atau



dipromosi, kalau saya menganggap itu dipromosi *kan* Pak karena *kan* levelnya agak lebih ini ya PHR *kan gitu*.

Catatan kami bahwa apakah masih mungkin dikaji ulang, *nggak* Pak, Pak Chalid tadi. Apa mungkin masih dikaji ulang itu terhadap promosi daripada mutasi, daripada Saudara Chalid tadi.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Dalam *case* ini mekanismenya *top-down* dari pemegang saham Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Dari pemegang saham, berarti *holding* ya Pak ya berarti kalau memang sudah, tapi sudah definitif Pak ya SK-nya?

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Belum dikukuhkan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Belum dikukuhkan, SK sudah ya? Sementara *kan* yang bersangkutan masih mempunyai catatan sama dengan kita *kan gitu*.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, SK-nya udah *nih* Pak, Pak SK-nya udah?

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Udah Pak, tapi belum ada RUPS.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Jadi belum ada RUPS, sudah ada SK? Gimana maksudnya?

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Harus di-RUPS-kan Pak, ditetapkan, itu *kan* mekanisme KPP.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus tadi yang saya tanya orang yang tidak bisa sopan santun seperti ini dijadikan dirut *gitu*, itu maksudnya *gitu loh*, masa *nggak* paham-paham yang

kita maksud, dari mana orang seperti ini bisa dinilai jadi dirut. Anda aja menjalankan proyek 4,2 triliun itu sekarang barangnya *nggak* bisa dipakai di Rokan itu, tapi anda bisa jadi dirut, saya pun *nggak* ngerti *gitu*.

Jadi nanti kita minta bongkar ini semua proyek yang gagal, yang dikerjakan Pak Wiko ini waktu jadi dirut anak perusahaan PGN. *Nah* ini sekarang orang yang memimpin yang didatengin Komisi VII tidak ada di tempat, mengutamakan apa kita *nggak* tahu tapi bisa direkomendasi, *kan* aneh *gitu loh*.

Saya minta ini dijadikan evaluasi, ini forum Pak, forum ini dilihat semua oleh masyarakat Indonesia. Ini satu kaki tangannya James, yang namanya James itu *nggak* tau siapa tapi semuanya dia yang menjalankan regulasi di situ. Saya minta dihadirkan juga orang itu, itu jadi biar *clear gitu*.

Oto ini orang yang mengganti seluruh regulasi anak perusahaan di bawah Pertamina Hulu Energi atas perintah James dan dengan bangga dan lantang dia membicarakan seperti itu.

Jadi segera Pimpinan, minggu depan kalau bisa panja ini sudah jalan untuk melakukan sejelas-jelasnya *gitu*. Saya minta sejelas-jelasnya *gitu* dan saya minta KPK juga harus masuk di sini *gitu* karena bawa-bawa nama KPK ini orang Oto ini *gitu*, biar *clear* dan jelas *gitu*.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi taa'ala wabarakatuh.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Sedikit Pimpinan, sedikit boleh Pak Lamhot.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Udah lewat waktunya, silakan.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Begini ini supaya *clear* karena ini yang kita bicarakan ini kan sangat esensial, selama ini kemitraan antara Komisi VII dengan Pertamina itu bagus-bagus saja. Tadi saya kan sudah sampaikan bahwa jangan sampai ada beban di Pertamina hanya karena tangan-tangan orang yang ikut campur yang tidak pihak orang lain.

Nah saya sarankan begini, Pak Wiko setelah ini Bapak langsung melapor ke Bu Dirut ya, Bapak tadi mendengar bagaimana sikap kita semua. Tujuan kita adalah mendukung Pertamina untuk mengejar target 1 juta barel per day, itu yang pertama.

Kedua, kita tidak mau dengan orang-orang yang dipimpin, yang memimpin Pertamina ini adalah hanya boneka yang suruhan orang lain. *Nah* kalau kemudian kadung, sudah kadung SK-nya sudah keluar, batalkan itu ya.

Kalau itu tidak dibatalkan dan kemudian didefinisikan itu nanti melalui RUPS, maka potensi kemitraan yang sudah berjalan bagus antara Komisi VII dengan Pertamina selama ini akan terganggu. Bagaimana mungkin di Rokan ya Pak Nasir, Rokan itu 32% hulu migas kita dari 70% penguasaan migas dipimpin oleh seorang Chalid, yang Chalid kata Pak Nasir adalah kaki tangannya James, yang James ini kita *nggak* tahu rimbanya, saat ini juga masih tersangka di KPK.

Bahaya ini Pak untuk sebuah negara sebesar Indonesia kita, saya pun tidak ikhlas Pak, saya tidak akan sebagai Anggota Dewan di Komisi VII ini yang ditempatkan saya tidak, tentu saya tidak akan ikhlas, tidak terima itu Pak ya. Dan kita tadi sudah mengatakan rapat keluar dari *...(suara tidak jelas 2.47.51)* tiba-tiba besok RUPS menetapkan dia sebagai **Dirut** PHR.

Lah di mana muka Komisi VII, kita pun datang ke PHM, waktu di PHM aja dia datang, kita, melecehkan kita, melecehkan kelembagaan *loh* bukan orang per orang ya. Lalu kemudian karena kita di kunjungan dia dengan semena-mena memecat *suspend* GM-GM-nya, yang GM-GM itu dipanggilin ke Kertanegara 86, bahaya ini Pak, bukan tempat Pak Prabowo, *sorry* ya.

Nah saran saya Pimpinan ya, kesimpulan kita hari ini nanti disusulkan dengan surat Pimpinan secara resmi besok, lalu kemudian pada hari ini setelah rapat Pak Wiko segera menghadap ke Bu Dirut, itu saran saya ya, sampaikan sikap ini bukan orang per orang *loh* Pak, Komisi VII Pak.

Yang kita inginkan adalah supaya kelembagaan ini antara institusi Pertamina dengan institusi DPR Komisi VII selama ini yang sudah baik-baik saja tidak ada masalah bisa berjalan untuk mencapai visi 1 juta barel.

Terima kasih.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pimpinan, interupsi Pak Ketua, 1 menit.

Kalau boleh jangan bawa-bawa Kertanegara lah, James ya James saja soalnya publik tahu rumah Kertanegara itu rumah Bos saya. Jadi James-James aja ya tapi *kan nggak* enak nanti didengar, ini terbuka *nih* rapatnya. Publik secara interpretasi iya tapi *kan nggak* usah disebut-sebut, langsung aja James ya James saja.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, izin 1 menit.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Saya tanya sama Pak Dirut Pak Oto, Pak Oto kenal sama James, Bapak kenal *nggak* saya tanya sama James, pernah jumpa sama Pak James?

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Jumpa sih pernah Pak, tetapi mungkin saya tambahkan juga izin Pimpinan kalau boleh ya Pak. Jadi kalau mekanismenya untuk tadi itu apa untuk pemilihan misalnya penentuan kaya GM.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, interupsi.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, hak guna bicara saya jangan dipotong karena Pak Nasir ngomong saya *nggak* potong Pak Nasir ya, sekarang saya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Maaf Pak Nasir, sebentar Pak Nasir, Pak Gunhar dulu.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Saya lagi interaktif dengan Pak Oto.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Silakan, silakan.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Iya, jadi kalau di ada mekanismenya Pak di kami sesuai juga dengan pedoman dari *holding*, Pak. Jadi di kita itu ada namanya TRM, jadi TRM itu kami kayak saya di SDM itu apa, memfasilitasi pertemuan apa para direktur, misalnya di region 1 di calon GM *gitu* ya, Pak ya.

Itupun kalau tidak rata-rata itu jadi levelnya sama Pak, kalau *nggak* itu melalui mekanisme namanya ICP. Kemudian itu ada namanya TRM Pak, TRM misalnya untuk level GM ke atas, itu eksekutif, namanya eksekutif TRM.

Kemudian para direktur itu bicara, dilihatkan dengan sesuai baik itu kompetensinya, teknisnya, kemudian juga *personality*-nya, kemudian ada juga kayak sisi integrasi dan sebagainya Pak, dari situ misalnya untuk, itu kemudian setelah jadi, dites. Jadi tidak ditunjuk-tunjuk kayak begitu Pak, kemudian hasilnya itu kami masukkan ke DPKP namanya, itu masuk ke *holding*, meminta persetujuan. Jadi proses.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Oke, saya paham itu Pak, itu teknis ya, di dalam ya.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Itu pelaksanaannya.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Nah sekarang saya tanya, Bapak pernah berjumpa dengan Pak James?

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Pernah sekali.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Dalam kapasitas apa itu Pak, urusannya apa itu, berteman Bapak dengan Pak James?.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Nggak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Sekarang kita bicara Pak James, kita bicara Pak James di dalam ruangan ini sementara satupun tidak ada kewenangan Pak James di situ untuk mengatur seluruh apa yang ada di situ kan Pak, betul Pak? *Nah* sekarang pertanyaan kita, ya kalau memang James ini kita anggap mengganggu, mengganggu kinerja Pertamina Hulu Energi, apa kapasitasnya James? Tidak ada regulasi yang memberikan dia kewenangan untuk mengatur seluruh jabatan struktural yang ada di sini.

Nanti kita menimbulkan fitnah, praduga iya *kan*, apalagi kita mengintervensi PHE ini untuk membatalkan seorang dirut, terlalu jauh kita mencampuri urusan itu iya *kan*. Kita berapa kali *kok* dulu pernah nolak Menteri BUMN kita *nggak* usah ikut hadir, tetap ada jalan kewenangannya ada, Tupoksinya juga udah ada.



Jadi menurut saya Pimpinan, jangan sampai rapat ini semakin liar dan panjang kita fokus aja nanti kita bahas di panja dan kita sama-sama Anggota Komisi VII ini saling menghormati, saling menghargai pendapat satu sama lain. Kalau mau dibuka ruang debat di sini, debatnya panjang iya *kan*, kalau mau udah diputuskan, putuskan aja, udah kita selesai, dijawab, kita bahas nanti di Panja.

Terima kasih, Pimpinan.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, jadi udah tepat itu panja, kalau panja kan tertutup. Kalau di sini liar sebut jalan lah, inilah, inilah *kan nggak* pas. Kita ini Anggota Dewan yang terhormat ini, baru panja kita investigasi lebih dalam, tertutup *gitu*, *nggak* boleh *nggak* ini, *nggak* boleh *nggak* datang, kalau *nggak* datang itu *contempt of parliament*, ada hukumnya, ada undang-undangnya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Itulah yang terjadi tadi Pak Ramson.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Iya, itu kita rapat tertutup saja begitu, jadi jangan liar-liar ini benar juga saya sependapat itu dengan yang terhormat Pak Gunhar itu. Jadi supaya jangan ini salah pengertian, kalau memang kita lihat dari rapat ini ada ditemukan kasus-kasus yang membahayakan eksistensi Pertamina Hulu Energi, kita buat panja, kita investigasi lebih dalam *gitu* karena ini kita rapat terbuka, ada salah ngomong, salah ngomong, publik salah persepsi repot lagi, itukan bahaya, jadi viral lagi nanti *kan nah gitu*. *Nah* itu tolong kita lebih hati-hati ya, lebih hati-hati, jadi jangan membawa-bawa jalan-jalan apalah *gitu*.

Terima kasih, terima kasih.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi sedikit Pimpinan, meluruskan saja.

Tadi kan sudah ditanya Saudara Gunhar, apa potensi ketemu dengan James. Itu yang kita, yang sekarang isu di mana-mana ini permasalahannya sudah mencuat, inilah yang mengatur regulasi di Pertamina ini, mengganti GM, dirut, semua.

Nah jadi *mangkanya* kita berani memberikan di sini karena sudah terdengar dan sudah terjadi dari beberapa orang, ini disampaikan di sini *gitu*. *Nah* apa tadi urusannya Pak Otto ini ketemu dengan James, yang saya dengar James ini dekat dengan Menteri BUMN, orangnya Menteri BUMN. Pak, ini hak suara saya jangan lupa atur, *oke*, jelas ya Bos. Jadi saya punya hak sendiri, jadi atur suara anda aja, suara saya, saya sendiri yang ngatur, ya biar jelas.

Jadi itu Pimpinan, jadi kita meluruskan dari regulasi kunjungan Komisi VII itu meluruskan pertemuan ini. *Nah* orang yang seperti ini masih bisa lagi direkomendasi jadi dirut, itu yang disampaikan teman-teman tadi.

Itu yang diluruskan *gitu loh*, *nah* kalau orang yang seperti ini lagi dijadikan Dirut, mau dijadikan apa *gitu loh*, dia dirut di sana saja sudah tidak patuh, dia diminta hadir *nggak* hadir, masa orang yang kayak gini ditunjuk lagi *gitu loh*. *Nah* ini bila perlu Saudara Oto ini dibuang juga dari regulasi sini *gitu loh*, yang membuat kacau-balau di sini.

Itu Pimpinan intinya, terima kasih.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Interupsi Pimpinan, 1 menit aja.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Pak Falah silakan, kita ini udah lewat waktu *nih*, Pak.

Silakan Pak Falah.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Saya terlambat karena tadi shalat, tapi saya menyimak.

Terima kasih Pimpinan, tadi sudah banyak teman-teman menyampaikan bahkan sampai ada bicara orang lain yang di luar struktural Pertamina, saya pikir begini apapun itu namanya James Word atau Word James, siapapunlah namanya itu orang lain, kita *nggak* peduli itu siapa ya kan tapi itu tidak ada didalam struktur Pertamina.

Kalau itu orang ada di struktur Pertamina kita panggil, kita tanyain tapi kalau itu orang lain ngapain juga *kan gitu*. *Nah* supaya terang-benderang ya kita pertajam nanti di Panja, tapi jika kita harus memanggil seseorang yang tidak ada kepentingannya dengan Pertamina ya itu sesuatu yang *nggak* pas buat saya.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih.

Pak Wiko masih ada dilanjuti? Cukup ya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sebentar, sebelum Pak Wiko, interupsi.

Kalau udah di panja biarpun di luar struktur bisa dipanggil Pak, kalau di panja tapi kalau ini kan rapat terbuka, kita hanya dengan beliau-beliau rapatnya RDP

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, terima kasih.

Oke, saya pikir cukup Bapak, Bapak-bapak jawaban penjelasan disampaikan oleh Pak Direktur sudah cukup dan saya pikir kita tadi udah saya sampaikan kita minta untuk secara *pointer*-nya saja yang dijawab dan sisanya mohon izin untuk bisa dijawab secara tertulis Pak Wiko dan sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari rapat hari ini, silakan tayangkan.

Kesimpulan RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam dan PT Pertamina Hulu Rokan, Selasa 10 April 2023.

1. Komisi VII DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina Hulu Energi untuk melakukan upaya-upaya strategis agar target produksi minyak sebesar 1 juta barel perhari (bopd) dan gas 12 miliar standar kaki kubik atau bscfd pada tahun 2030 dapat tercapai.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI merekomendasi Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah melakukan *contempt of parliament* dengan tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dan PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023, dengan alasan yang tidak jelas.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Tadi poin kedua ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita *kan* tidak memberikan ruang kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam ini apa yang menjadi alasan yang tidak hadir, *kan* itu persoalannya, tetapi kita tidak bisa memintai keterangan karena kita suruh dia keluar sebagai bentuk keprihatinan kita lah, apa yang telah dilakukan ketika kita melakukan kunjungan



kerja ke Kalimantan, seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Direktur Pertamina Hulu Mahakam ini melakukan *contempt of parliament*, ini menurut saya terlalu jauh, terlalu jauh.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Interupsi Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Gini Pak Gunhar, saya coba jelaskan tadi mungkin Pak Gunhar tadi *nggak* denger apa yang saya sampaikan. Ini suasana kebatinan, tadi ada Ibu Ratna, Ibu Diah, semua ini suasana kebatinan kita ya. Pertama, waktu itu dari pagi kita berangkat subuh Bos ya sampailah kita di sana, ternyata Dirutnya tidak ada.

Itupun kita masih berbesar hati, kita sampaikan Pak Wiko, benar ya Pak Wiko. Pak Wiko kalau beliau berhalangan pagi ini sampai siang, tolong dihadirkan nanti sore atau malam sekalipun sampai kita menginap, kita tunggulah sampai malam ya *toh*. Sampai malam pun yang namanya, saya kira Pak Wiko kan juga atasannya beliau kan, sampai malam pun tidak ada kabar, tidak datang ya, telepon pun tidak bisa ditelepon.

Setelah kejadian itu, pulang lah kita, pada saat kesimpulan kita bahwa orang ini sudah melecehkan kita karena tidak ada kabar apa-apa ya *toh*, sampai setelah berminggu-minggu setelah kejadian itu, sampai hari ini tidak juga ada surat satu lembar ataupun telepon kepada Pimpinan.

Ini yang pimpin Pak Dony Oekon *loh* ya, kita cek, saya cek sampai beberapa hari yang lalu saya cek Pak Dony Oekon. Pak Dony Oekon sudah ada kabar belum dari Pak Chalid bahwa beliau tidak hadir? Tidak ada.

Artinya apa? Ini betul-betul pelecehan kelembagaan, *contempt of parliament*, sudah tidak datang, tidak merasa bersalah, itulah suasana kebatinan kita ya *toh*. *Nah* lebih jauh lagi adalah kita dapat kabar seminggu yang lalu, GM yang menyambut kita di sana dinonaktifkan hanya karena menyambut kita.

Nah inilah yang kita suasana kebatinan kita Pak Gunhar yang tidak hadir, bangun subuh-subuh *loh* berangkat kita, ya. *Nah* itu aja, jadi kalau poin nomor 2 saya kira teman-teman sudah sepakat semua ya. Kalau saya tadinya lebih ekstrim minta Dirut Pertamina untuk mencopot dan tidak boleh lagi menduduki jabatan di lingkungan Pertamina. Tapi *oke* lah kalau teman-teman menyarankan seperti ini, saya *monggo*, saya ikut, saya tadi lebih ekstrim lagi.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Saya memahami suasana apa yang dialami kawan-kawan waktu melakukan kunjungan, tetapi di sini saya coba membangun narasi *contempt of parliament* yang mungkin karena *background* saya bidang hukum, saya jelaskan dulu. *Contempt of parliament* ini adalah dalam bentuk parlementer

yang tidak kita kenal di pemerintahan kita, kita ngeri-neri sedap pakai bahasa *contempt of parliament* ini iya kan karena pemerintahan kita *presidensil* iya kan.

Kalau kita mau bicara *contempt of parliament* ini menganggap menghina lembaga negara legislatif, ini ada ancaman hukuman, pasti dan tidak bisa tidak. Tetapi kalau kita menganggap bahwa Direktur Pertamina Hulu ya, bahasanya ya dengan tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik, maka Direktur Pertamina kita minta memberikan sanksi keras kepada Direktur Pertamina Mahakam, *yes, nggak* masalah saya.

Tapi kalau kita bilang bahwa dia melakukan *contempt of parliament*, ini orang kena hukuman Pak, bukan hanya pemecatan sebagai Dirut Pertamina Mahakam, tapi juga harus melalui proses hukum, *nggak* bisa kita bilang dia *contempt of parliament*. Kita tidak memberikan dia hak jawab, apa alasan dia tidak hadir.

Mungkin kita-kita semua di ruangan ini pernah mengalami itu, hal yang penting kita tidak bisa hadir. Tetapi ketika dia hadir untuk memberikan klarifikasi kita sudah suruh dia keluar untuk menghormati suasana kebatinan kita. Saya tidak larang *kok* dia keluar, silakan keluar, tapi kalau kita memberikan *punishment* kepada dia, dia melakukan *contempt of parliament*, saya Fraksi PDI Perjuangan Perjuangan tidak setuju, kita ubah narasi bahasanya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, sedikit saya klarifikasi ya, saya klarifikasi.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dari tadi Pak Gandung, silakan Pak Gandung dulu Pak Ramson.

Silakan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Jadi peristiwanya itu *kan* tadi minta klarifikasi peristiwanya, kemudian timbul berbagai macam pertanyaan dan tanggapan. Kemudian kita sepakat untuk bisa dikeluarkan dulu, namun setelah itu kita memberikan rekomendasi Pimpinan untuk menyelesaikan masalah itu antara di skor dan tidak karena tidak di skor, kemudian Pimpinan nanti yang menyelesaikan, itu rekomendasi resmi tadi kalau *nggak* ini coba kita rekamannya kita ulang lagi, *bener nggak* saya sampaikan itu.

Nanti tadi Pak Sugeng yang mimpin itu, jadi itu nanti tugas Pimpinan untuk menyelesaikan dengan Pak itu, siapa, Pak Wiko, bagaimana jalan keluarnya *gitu* karena memang tadi klarifikasinya sederhana sekali, simpel sekali. Kalau tadi bertiga itu beliaunya sudah minta maaf, tapi di sini permintaan

maaf diterima namun kronologisnya itu seperti apa. Ini perlu kita tindaklanjuti kesepakatan tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, silakan Pak Ramson, silakan Pak Ramson.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pertama, *contempt of parliament* itu ada di hukum kita. Cuma yang kedua, ini kurang pas masuk diasumsikan atau diputuskan sebagai *contempt of parliament* karena harus ada tindakan hukum kita lapor ke polisi, kalau adanya ada, tapi yang kedua ini belum pas. Jadi malah mendegradasi pemahaman *contempt of parliament*, jadi hanya membuat kesimpulan seperti ini, bukan. Itu harus dibawa langsung diproses, proses pidana itu.

Yang ketiga, dicarilah kesimpulan lain yang memberikan apa namanya sikap yang keras dari Komisi VII terhadap tingkah laku tadi Dirut Pertamina Hulu Mahakam tadi, lebih bagus dibuat bahasanya Pak Ketua. Jadi jangan sampai tergradasi pemahaman *contempt of parliament*, jadi nanti untuk berikutnya orang *nggak* segan lagi dengar *contempt of parliament*.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Ramson.

Tadi Pak Nasril dulu, silakan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Saya melihat Pak Gunhar ini semakin sore semakin cerdas, cerdas dan jelas. Jadi saya kalau sampai diberikan sanksi-sanksi tegas dan keras kan *gitu* saya setuju, Direktur Utama PT Pertamina Hulu kalau pasal pencopotan boleh *nggak* ya, kan usulan pencopotan, aneh *nih*.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Izin Pimpinan, kalau *nggak* salah periode lalu ya Komisi VI itu menolak rapat dengan Menteri BUMN, Ibu Rini Soemarno, 1 periode *nggak* rapat Pak, jalan aja. *Nah* ini yang kita sering salah melakukan tugas kita sebagai anggota

parlemen *gitu loh*. Tetapi padahal dalam proses rapat kita, Bapak Komisi VI Pak Nasril ya kalau *nggak* salah ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nggak saya punya pengalaman Komisi VI juga Pak, memberhentikan Sugiarto menjadi Dirut BUMN, itu Komisi VI juga.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Kan tergantung *user* Pak, bola *kan* tinggal tendang-tendang aja.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Saya berharap Pak Gunhar **menerima pendapat orang lain juga (3.09.27)**.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pak Gunhar yang pernah jadi Komisi VI di sini saya, Pak Nasril sama Pak Mukhtarudin ya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Oke, saya sampai ini tegas dan keras ya kepada Direktur PHM telah melakukan pelecehan terhadap lembaga, ini lembaga Pak, lembaga DPR RI (Komisi VII).

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Begini, begini, kita bukan lembaga peradilan di sini catat ya, kita lembaga politis, satu. Di dalam lembaga peradilan untuk memutuskan suatu perkara tentu ada 2 saksi, saya berbicara ini Pak Nasir, iya bukan, bukan begini, maksudnya saya kasih klarifikasi dulu ya.

Ketika hakim menanyakan kepada saksi sebagai bukti-bukti ya, ini namanya klarifikasi Pak iya *kan*, fakta persidangan tetapi kalau kita hanya memberikan *punishment* kepada yang bersangkutan tanpa kita meminta klarifikasi, itu namanya zalim.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Saya ralat Pak Gunhar, klarifikasi itu ada ya tolong, dengar dulu.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pak Lamhot bicara saya tidak pernah potong Pak Lamhot. Saya jelaskan dulu.



F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Dengar dulu, dengar dulu, tadi beliau tadi.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pak Lamhot silakan selak kalau saya sudah bicara.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Bukan, inikan saya mengklarifikasi omongan Anda.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Nggak saya lagi ngobrol sama Pak Nasril iya kan.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Betul, bahwa klarifikasi itu.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Saya lagi menyikapi Pak Nasril apa yang disampaikan Pak Nasril sudah pelecehan.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Klarifikasi itu sudah diberikan oleh Saudara Chalid tadi, dia tadi menceritakan ada pertemuan komisaris, *bla, bla, bla* dengan Menteri ESDM, *bla, bla, bla*, sudah. Klarifikasi sudah kita dengar baru kemudian, klarifikasi itu tapi akibat dari pada sampai hari ini tidak ada pernyataan yang resmi ya dan itu kita anggap sebagai pelecehan kelembagaan.

Tadi pun sebelum rapat ini Pak Wiko, Pak Chalid juga datangi kita satu-persatu minta maaf ya, minta maaf. *Oke* kita maafkan karena ini bulan ramadan kita maafkan, tapi jangan sampai lembaga ini dilecehkan dan kita maafkan begitu saja ya. Ini menjadi preseden buruk nanti, kepada siapapun.

Tadi di awal saya udah bilang, visi kita ini adalah mendorong Pertamina ini mencapai target 1 juta barel. Kalau orang-orang seperti itu dan dia adalah boneka orang lain yang tidak ada kepentingan di Pertamina, terus terang saya *nggak* ikhlas, saya pun *nggak* setuju.

Nah oleh karena itu ngapain kita bela orang-orang seperti itu, saya *nggak* mau dipimpin, Pertamina dipimpin oleh orang seperti itu yang notabene dia adalah bonekanya Saudara James.

Semua tadi kawan-kawan sudah mengatakan dan sifat arogansi yang dipertontonkan oleh Saudara Chalid ya justru itu adalah bentuk pelecehan

terhadap kelembagaan ini, kalau nanti lembaga DPR ini dibuat oleh seperti apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Chalid maka semua nanti direksi-direksi Pertamina yang akan memperlakukan kita seperti itu. Di mana marwah daripada DPR RI? Itulah yang saya maksudkan.

Terima kasih.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, saya lanjutkan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Apa yang disampaikan Pak Nasril tadi, jadi begini Pak Nasril kalau kita menggunakan kata pelecehan itu di Bahasa Indonesia *kan* sama saja sebetulnya penghinaan ya. Jadi kita kurang tepat, sebetulnya kalau bicara nama James saya sepakat. Artinya ini *kan* subjek yang belum jelas James ini, kita tahu nama.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nggak, kita nggak bicara James Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

*Nggak, nggak ini kan kembali yang disampaikan oleh rekan kita tadi ya. Nah kalau ini masalah pelecehan saya pikir sama saja, kalau kita masuk kepada memberikan sanksi yang tegas dan keras kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam ya *monggo*, silakan itu bahasa yang kita pakai dalam forum RDP ini iya. Ini *kan* kalau kita kaitkan yang bersangkutan adalah kaki tangannya atau apapun bentuknya, ini *kan* masih wacana.*

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nggak ... (suara tidak jelas 3.14.15)

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Perlu pembahasan lebih lanjut.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Di sini poinnya bukan di situ.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Kalau kita masuk kepada kesimpulan ya, Komisi VII DPR RI merekomendasikan Direktur Pertamina untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam karena melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR RI, ini dihapus aja iya *kan*.

Dengan kita telah memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam ya itu sebetulnya sudah cukup poin yang kita masukkan, walaupun nanti kita masukkan lagi kenapa kita memberikan sanksi tegas kepada Direktur Pertamina Hulu Mahakam, masuk kita poinnya karena tidak ikut hadir pada saat Anggota Komisi VII kunjungan ke Kalimantan, boleh dimasukkan poin kedua itu. *Nah* kalau lebih dari situ kita melampaui kewenangan kita bos.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Katakan kita punya *reasoning*, kenapa kita memberikan sanksi keras dan tegas.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Kita tambahkan karena dia tidak hadir.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Tidak hadir.

Nah itu yang dikatakan pelecehan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pak Nasril yang terhormat, mohon izin Pak.

Saya tadi buka Google dari tadi saya buka *contempt of parliament* ini, ini Bahasa Inggris Pak. Kalau orang PDI Perjuangan ngomong Inggris, salah-salah sedikit PDI Perjuangan ini. Sebetulnya Bahasa Indonesianya sama iya *kan*, pelecehan terhadap parlemen iya *kan*.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Beda Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Nah ini konteksnya kita ini belum *match* betul, belum pas itu aja.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pak Gunhar *gini loh* Pak, inikan udah runut, sebenarnya saya udah runut saya jelaskan Pak Gunhar ya. Biasanya saya jelaskan Pak Gunhar ini orang yang paling cepat mengerti apa yang saya sampaikan, *nggak* tahu kali ini mungkin.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Contoh ya, saya contohkan *contempt of parliament* ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Dengar dulu Pak Gunhar, dengar dulu.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Nggak yang ngatur lalu lintasnya Pak Dony Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Saya udah minta izin Pimpinan, saya minta izin Pimpinan.

Kan tadi saya udah bilang ya, bayangkan 7 Februari Bos, sekarang ini tanggal 10 Maret, 1 bulan lebih. Taruhlah kemudian 2 hari setelah 7 Februari dia ada telepon lah minimal atau apalah, *nggak* usah surat resmi lah ya mungkin kita masih terobati lah.

Saya sudah bilang secara runut tadi Pak Gunhar, kita hormati Pak Wiko, Pak Wiko bisa hadir *nggak*, kalau *nggak* sore ya malam *deh*, *nggak* juga *tuh*. Setelah kita pulang ya kita berharap ada surat resmi, kalau *nggak* ada surat resmi pemberitahuan lah, sampai 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya cek Pak Dony Oekon ada *nggak* pemberitahuan ketidakhadiran dia, *nggak* ada, *nggak* ada Bos.

Itu si orang Chalid Bos, *lah* kita datang ke sana untuk visi untuk bagaimana mendorong mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi, *kok* kita *nggak* begitu *kan*. *Lah* itu terlecehkan maksud saya, itu yang terlecehkan, yang dilecehkan tentu bukan kita secara orang per orang, bukan pribadi tapi adalah kunjungan kerja resmi Komisi VII DPR RI ke sana dan sampai hari ini tanggal 10 Juli begitu kita mau RDP kita panggil dia, baru lah dia tadi datang satu-satu ke kita, minta maaf Pak, minta maaf Pak.

Apa itu? Kenapa dia harus datang minta maaf sama kita, karena kita *nggak* di anggap Bos, kita dilecehkan, itu perlunya kata-kata itu. Belum lagi kita dengar tadi Pak Wiko mengatakan hari ini dia sudah di-SK-*kan* tanpa RUPS, hebat betul *nih* orang, tanpa RUPS pun bisa di-SK-*kan*.



Jadi sudah lah saya pikir nomor 2 semua teman-teman udah sepakat Ketua, tinggal diketok aja.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Interupsi Pimpinan, Falah Amru.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan.

F-PDIP (H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E.):

Inikan sebentar lagi buka puasa, saya pikir kita ini tadi juga sudah dengan keras, juga sudah dengan tegas mempersilakan Saudara Chalid meninggalkan ruangan iya *kan*. Artinya ini pelajaran yang luar biasa buat Pertamina, khususnya Pertamina Hulu Energi sehingga di sini saya berharap di rekomendasi poin 2 ini tidak usah lagi *lah* ada kata-kata melakukan pelecehan terhadap lembaga DPR.

Ya sudah aja langsung Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirut Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI-Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari *gitu loh*.

Jadi ini jangan bertele-tele soal urusan ini, kita paham bahwa secara tidak langsung dan secara langsung Saudara Chalid sudah melecehkan kita, kita berangkat pagi, kita terbiasa berangkat pagi, jam 4 baru bangun, jam 5 berangkat, ternyata *nggak* ada orang, kita terlecehkan.

Tapi saya minta juga kepada teman-teman dalam hal ini, dalam hal ini kita tadi juga sudah memberikan hal yang sepadan, setidaknya sudah membuat Pak Chalid itu malu di depannya Pak Wiko dengan keluar dari ruangan. Itu juga sudah tamparan yang keras *gitu loh*, jadi saya mohon kepada teman-teman kita menghilangkan pelecehan terhadap lembaga DPR RI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, sebentar Pak ini, ini kita kalau dilebarin terus *nih* panjang.

F-PG (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Langsung Pimpinan, mengambil kesimpulan.



**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Saya sebagai Pimpinan, mau mengambil sikap Pak ya, izin.

Untuk poin 2 ini tadi memang sudah sanksi tegas dan keras itu sebetulnya udah jelas, tapi memang kalau saya justru yang memimpin dalam acara itu. Saya memang juga merasa ya seperti yang Pak Lamhot sampaikan tadi merasa tidak dihargailah.

Kami datang ke sana, terlepas dari kita datang pagi, apa segala macam kita lakukan *lah* sama-sama, betul ya. Cuma dengan kita hadir di situ dan saya sangat menghargai Pak Wiko saja hadir *gitu loh*, Pak Wiko hadir sebagai atasannya dan memang sampai hari terakhir, sampai kita datang kami tidak mendapatkan penjelasan apapun, surat atau kabar, atau apapun yang menyatakan, atau telepon yang tidak bisa hadir.

Dan apa yang disampaikan oleh Pak Lamhot tadi juga betul-betul jelas, sebelum acara RDP ini sendiri mereka bertanya, teman-teman di lapangan nanya, ada komunikasi tidak? Tidak ada.

Nah ini makanya yang begitu dalamnya Pak Lamhot tadi marah karena apa? tidak ada ini itikad baik untuk memperjelas ini, ujug-ujug datang tadi minta maaf. Ya buat kami juga *kok* semudah itu ya *gitu* ya, sudah sekian lama. Ini sedikit penjelasan, Pak Wiko kira-kira ada masukan *nggak* Pak Wiko?

Silakan.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Baik, sekedar pertimbangan aja bahwa yang bersangkutan itu tidak ada niat untuk melecehkan Lembaga DPR. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan pada hari yang sama itu ada rapat dengan komisaris dan membahas RJPP serta insentif untuk program kerja yang diajukan ke ESDM dan SKK Migas.

Perlu kami informasikan di regional ini direktornya cuman satu Pak, cuman satu. Pak Chalid juga tadi sudah menjelaskan pada akhirnya dia memutuskan mengambil rapat dengan komisaris tersebut, bukan dengan niat untuk melecehkan Pak, karena cuman satu di sana direktornya.

Pada hari kejadian sebetulnya saya komunikasi, dia berusaha untuk mendapatkan penerbangan. Memang di data penerbangan itu masih ada, tapi posisi dia *tuh* di luar Jakarta Pak, di luar Jakarta. Jadi sekali lagi kalau niat untuk melecehkan itu tidak ada dan saya kira kami akan tetap menghormati dan sangat menghormati Komisi VII DPR RI ini.

Itu aja tambahannya Pak.



KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, *oke* terima kasih Pak penjelasannya tapi kami di sini memang kita punya harus ambil sikap ya. Teman-teman di DPR juga harus mengambil sikap, jadi saya pikir saya coba mensingkatkan pernyataan ini Pak ya.

Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah tidak menghadiri kunjungan spesifik Komisi VII DPR di PT Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023 tanpa alasan apapun.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu pas Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya tanpa adanya ya itu cocoklah, tanpa adanya alasan. Jadi saya pikir ini jelas, dia sampai hari ya kalau seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Wiko sebetulnya ya kita bisa terima *gitu* Pak Wiko ya, cuma sampai hari terakhir kami itu secara resmi tidak mendapatkan berita itu, informasi, itu yang membuat kita sebetulnya teman-teman apa *standing statement* kita di situ Pak ya, setuju ya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Oke, setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirut PT Pertamina Persero untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam karena telah tidak hadir pada kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI kepada Pertamina Hulu Mahakam pada tanggal 7 Februari 2023 tanpa adanya.

Setuju ya, saya ketok ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kurang cepat Pak Ketua, mengajukan ini karena tadi udah nyasar, urusan jalan lah, apalah, kurang tepat karena kita *nggak* ikut *sih* ikut ke Kaltim waktu itu.

Terima kasih.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Sebentar Pak Ramson, jadi sebagai tindak lanjut daripada kesimpulan nomor 2 ini bahwa Komisi VII harus berkirin surat secara resmi kepada Dirut Pertamina. Jadi bukan hanya kesimpulan saja, tapi surat juga Komisi VII yang ditandatangani oleh pimpinan, sehingga tidak lanjut daripada. Jadi tidak hanya sekedar kesimpulan tetapi juga surat tertulis dari Komisi VII kepada Dirut Pertamina.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kesimpulan ini dilakukan di DPR ini sama kekuatannya dengan undang-undang, jadi sebetulnya kalau mereka terima ini pun sama sebetulnya jauh lebih kuat. Ini kesimpulannya jauh lebih kuat saya pikir ya, nanti kita, kita bahas di internal ya setuju ya?

Langsung nomor 3 ya.

3. Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirut PT Pertamina Persero untuk tidak terpengaruh intervensi dari pihak luar yang mengatur jabatan struktural dan pengaturan proyek-proyek di lingkungan PT Pertamina Hulu Energi.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Saya setuju.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Ada proyek-proyek strategis juga, seperti apa eksploitasi dan eksplorasi itu kan di, ini kan strategi itu, yang non strategis kan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kalau di bilang proyek-proyek itu semua Pak, kalau strategis *kan* itu cuma strategisnya saja, ini lingkupnya lebih luas. Jadi ini secara *general*, jadi jangan pakai strategis lagi, ini proyek-proyek di lingkungan Pertamina Hulu Energi ya.

Oke, nomor 3 oke?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



4. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti melalui pembentukan Panja Pertamina Hulu, guna mendalami permasalahan-permasalahan di sektor hulu migas di Pertamina.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Tambahan hulu kali, hulu migas, bukan hulu, Panja Pertamina Hulu Migas.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Guna mendalami persoalan-persoalan di sektor hulu migas di Pertamina, setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

5. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Mahakam & PT Pertamina Hulu Rokan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 17 April 2023.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Selesai, silakan atas persetujuan Anggota, Bapak-Ibu yang saya hormati. Demikian pembahasan dan kesimpulan rapat dengar pendapat pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat hari ini kami persilakan kepada Direktur Pertamina Hulu Energi untuk memberikan *closing statement*-nya.

Kami persilakan.

DIRUT PT PERTAMINA HULU ENERGI (WIKO MEGANTORO):

Baik, terima kasih Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Ke depan kami akan berusaha lebih baik lagi bermitra, tentu saja dengan tujuan untuk sama meningkatkan produksi migas nasional dari kami sebagai pelaksana, dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai fungsi pengawasan.

Saya kira kita akan terus menghormati Komisi VII dan kita akan terus bermitra dengan baik.

Terima kasih.



**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Mahakam dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang baik dalam rapat dengar pendapat hari ini.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* rapat dengar pendapat pada hari ini saya menyatakan ditutup.

*Billahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.40 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002

